

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN
PEMBACAAN AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF**

HUSEIN MUHAMMAD



Oleh:

Mohamad Sobirin
NIM. 1330016031

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks, (0274) 557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN AL-QUR'AN
KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD

Ditulis oleh : Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.

N I M : 1330016031

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 1 Juli 2019

Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVEDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **1 FEBRUARI 2019**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVEDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVEDUS, **MOHAMAD SOBIRIN, S.Th.I., M.Hum.** NOMOR INDUK MAHASISWA **1330016031** LAHIR DI **REMBANG** TANGGAL **7 NOVEMBER 1987**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUNJAN (CUM LAUDE)~~ / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 660

YOGYAKARTA, 1 JULI 2019

REKTOR
KETUA SIDANG,

PROF. DRS. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks. (0274) 557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
N I M : 1330016031

Judul Disertasi : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN
AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Phil. Sahiron, MA.

Anggota : 1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Promotor/Penguji)

2. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA. (Promotor/Penguji)

3. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. (Penguji)

4. Dr. H. Hamim Ilyas, MA. (Penguji)

5. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah (Penguji)

6. Prof. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D., D.Min. (Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 10.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,73

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,

Dr. Phil. Sahiron, MA.

NIP. 19680605 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM : 1330016031
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM. 1330016031



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

Promotor : Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN
AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD**

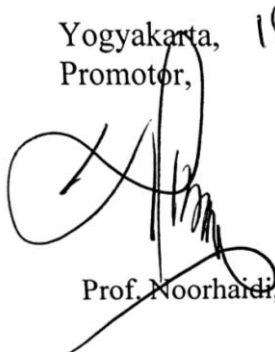
yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM : 1330016031
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 11 Februari 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 April 2019
Promotor,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD

yang ditulis oleh:

Nama	:	Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM	:	1330016031
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 11 Februari 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2019
Promotor,



Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN
AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD

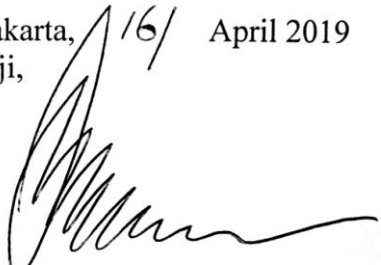
yang ditulis oleh:

Nama	:	Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM	:	1330016031
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 11 Februari 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16/ April 2019
Penguji,



Prof. Dr. M. Amin Abdullah, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN
AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD

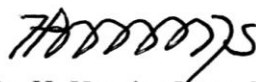
yang ditulis oleh:

Nama	:	Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM	:	1330016031
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 11 Februari 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, // April 2019
Penguji,



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBACAAN
AL-QUR'AN KRITIS ADVOKATIF HUSEIN MUHAMMAD

yang ditulis oleh:

Nama	:	Mohamad Sobirin, S.Th.I., M.Hum.
NIM	:	1330016031
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup tanggal 11 Februari 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 April 2019
Penguji,



Dr. Inayah Rohmaniyah, M.A., M.Hum.

ABSTRAK

Tafsir agama Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer, sebagai sebuah wacana, menunjukkan proses produksi yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari Komnas Perempuan hingga organisasi Islam Sipil di Indonesia, bahkan lembaga internasional. Meskipun identitas Husein Muhammad sebagai figur kultural dalam Islam Tradisional lebih ditonjolkan dalam setiap produk wacananya, namun jabatan strategis dirinya dalam struktur organisasi tersebut, terlebih keterlibatan mereka dalam wacana yang ia produksi, cukup mengindikasikan adanya kepentingan tertentu yang dibangun, disamping kepentingannya sendiri sebagai produsen wacana sekaligus pembaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, disamping bermaksud menguraikan praktik penafsiran yang dijalankan oleh Husein Muhammad dalam wacana perlindungan hak kelompok berorientasi seksual diluar *mainstream*, hak minoritas kelompok beragama/berkeyakinan dan hak perempuan, penelitian ini secara khusus bertujuan mengungkap relasi kuasa pengetahuan yang beroperasi di dalamnya.

Untuk tujuan itu, penelitian kepustakaan ini dikerjakan dengan mengacu pada metodologi dan kerangka teori yang ditentukan. Metodologi yang digunakan meliputi teknik pengumpulan data dan analisis data. Data diperoleh melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai tulisan karya Husein Muhammad dari tahun 1999-2019 yang dipilih berdasarkan kesesuaian substansi materi dengan objek material penelitian ini, dan wawancara mendalam dengan Husein Muhammad serta berbagai pihak yang relevan dan kompeten. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan teori genealogi Michel Foucault dan hermeneutika Al-Qur'an.

Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa, sebagai wacana, tafsir agama Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dipraktikkan secara kritis dan advokatif. Sementara itu, relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi di dalamnya bergerak secara produktif baik dalam konteks produsen wacana, maupun dalam proses produksi dan konstruksi wacana. *Pertama*, dalam produsen wacana, relasi kuasa pengetahuan mengalir melalui proses struktural dan kultural. Secara struktural, relasi kuasa mengalir melalui posisi yang diduduki oleh Husein Muhammad di dalam struktur relasi kuasanya. Sedangkan secara kultural, relasi kuasa bergerak melalui berbagai

medium kultural seperti perjumpaan intelektual dalam kerja-kerja bersama antar lembaga. Sebagai produsen wacana, Husein Muhammad tidak sekedar berupaya mengungkap makna dibalik teks-teks agama yang diperdebatkan, maupun melakukan kritik sosial keagamaan yang dinilai diskriminatif bagi kelompok masyarakat tertentu, namun ia juga mengupayakan agar pandangan dan kehidupan sosial keagamaan kontemporer di Indonesia sejalan dengan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia universal. *Kedua*, dalam proses produksi wacana, relasi kuasa beroperasi secara negosiatif. Relasi kuasa beroperasi melalui kontrol terhadap hubungan Husein Muhammad dengan kebenaran pengetahuan dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kelompok masyarakat Indonesia yang mengalami diskriminasi. *Ketiga*, dalam produk wacana, meskipun wacana perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer yang diproduksi oleh Husein Muhammad terlihat mengadopsi ide-ide Hak Asasi Manusia universal, namun ia berupaya mengembangkannya secara adaptif dengan teks Al-Qur'an dan teks khazanah Islam Tradisional melalui kerangka reinterpretasi terhadap keduanya. Dengan tekniknya, Husein Muhammad berusaha menormalisasi konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia yang diupayakan melalui praktik pembacaan Al-Qur'an Kritis-Advokatif di tengah kalangan Islam Tradisional dan masyarakat Muslim Indonesia, yang sesungguhnya merupakan praktik afirmatif terhadap narasi Hak Asasi Manusia internasional.

Kata Kunci: Husein Muhammad; Perlindungan Hak Asasi Manusia; Pembacaan Al-Qur'an Kritis Advokatif; Relasi Kuasa-Pengetahuan.

ملخص البحث

التفسير الديني لحسين محمد عن حماية حقوق الإنسان في إندونيسيا المعاصرة، كخطاب، يوضح عملية الإنتاج التي تشمل عدة أطراف، من اللجنة الوطنية للنساء حتى المنظمات الإسلامية المدنية في إندونيسيا والمؤسسات الدولية. على الرغم من أن هوية حسين محمد كشخصية ثقافية في الإسلام التقليدي أكثر بروزاً في كل من منتجاته الخطابية، إلا أن مشاركتهم في الخطاب الذي ينتجه، ولا سيما كيانه كمفوض ومجلس الأخلاقيات في إحدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا؛ اللجنة الوطنية للنساء، يشير ببساطة إلى وجود بعض المهام الذي ينيها، بالإضافة إلى مهمته الخاصة كمنتج الخطاب وقارئ القرآن. ولذلك، بالإضافة إلى القصد ووصف ممارسة التفسير التي أجراها حسين محمد، يهدف هذا البحث خاصة إلى الكشف عن علاقة القوة-المعرفة العاملة في خطاب حماية حقوق الإنسان المعاصرة، وهي حقوق الجماعات ذات التوجه الجنسي خارج التيار الرئيسي، وحقوق أقليات المجموعة الدينية أو العقائدي وحقوق النساء.

ولهذا الهدف، يتم إجراء بحث المكتبة بالرجوع إلى المنهجية والإطار النظري المحدد. وتتضمن المنهجية المستخدمة تقنيات جمع البيانات وتقنيات تحليل البيانات. والحصول على البيانات من خلال مراجعة الأدبيات المختلفة التي كتبها حسين محمد من عام 1999-2019 والتي تم اختيارها بناءً على موافقة المادة المادية مع الكائن المادي لهذا البحث، والمقابلات المعمقة مع حسين محمد ومختلف الأطراف المختصة والمتصلة. وأما تحليل البيانات بواسطة نظرية الأنساب لميشيل فوكو وهيرمنوطيقا أو تأويل القرآن.

وتوصل هذا البحث النوعي إلى النتيجة أن تفسير القرآن الذي أجراه حسين محمد في خطابه حول حماية حقوق الإنسان المعاصرة يعتبر ممارسة القراءة النقدية والدفاعية للقرآن. وفي هذه الأثناء، علاقة القوة والمعرفة العاملة فيها تتحرك بشكل

إنتاجي، سواء في سياق منتج الخطاب أو في عملية إنتاج وبناء الخطاب. أولاً، في منتج الخطاب، تتدفق علاقة القوة والمعرفة من خلال العملية الهيكلية والثقافية. هيكلياً، تتدفق علاقة القوة عبر الموقع الذي كان يشغله حسين محمد في هيكل علاقة قوته. وثقافياً، تتحرك علاقة القوة عبر وسائل الإعلام الثقافية المختلفة، مثل اللقاء الفكري في الأعمال المشتركة بين المؤسسات. بوصفه منتجا للخطاب، لم يحاول حسين محمد قط الكشف عن المعنى وراء النصوص الدينية الجدلية، ولا النقد الاجتماعي الديني الذي يعتبر تمييزاً للمجموعات المعينة، ولكنه سعى أيضاً إلى أن تكون الوجهات والحياة الاجتماعية الدينية المعاصرة في إندونيسيا تتماشى مع فكرة حماية حقوق الإنسان المبنية على النظرة الدولية. ثانياً، في عملية إنتاج الخطاب، تعمل علاقة القوة في شكل تعاونية الحجة، والشرعية. تعمل علاقة القوة بشكل فعال من خلال السيطرة على علاقة القوة مع حقيقة المعرفة حول حماية حقوق الإنسان للمجتمعات الإندونيسية التي تعاني من التمييز. ثالثاً، في الخطاب المنتج، على الرغم من أن خطاب حماية حقوق الإنسان المعاصرة الصادرة عن حسين محمد يبدو أنه يتبنى حقوق الإنسان التي شيدتها علاقة قوته، فإنه يحاول تطويره بالتكيف مع نصوص القرآن والنصوص الإسلامية التقليدية من خلال إطار إعادة التفسير ضد كليهما. من خلال أسلوبه، قامت قوة المعرفة لحسين محمد بتطبيع فئة الإسلام التقليدي والمجتمع المسلم في إندونيسيا من خلال بناء حماية حقوق الإنسان التي سعى إليها من خلال ممارسة القراءة النقدية والدفاعية للقرآن، وهو في الواقع موقف إيجابي تجاه نظام حقوق الإنسان الدولي.

الكلمات المفتاحية: حسين محمد؛ حماية حقوق الإنسان؛ القراءة النقدية والدفاعية للقرآن؛ علاقة القوة والمعرفة.

ABSTRACT

As a discourse, Husein Muhammad's religious interpretation of the protection of Human Rights in contemporary Indonesia shows a multi-party production process involving from the National Commission on Women (Komnas Perempuan) to Civil Islamic Organizations throughout the country even international institutions. Although his cultural figure identity in Traditional Islam is highlighted in every discourse, these organizations' involvement in the discourse, in particular as a Commissioner (2007-2014) and a member of Ethics Council (2015-2019) in –one of national human rights institutions– Komnas Perempuan, suggests the existence of interests in addition to his own as the producer of the discourse and The Qur'an interpretation. Therefore, this study is meant to elucidate Husein Muhammad's interpretation; besides, it particularly aims at revealing the power-knowledge relation involving in the protection of contemporary Human Rights, i.e. the rights of non-mainstream sexual-oriented groups (LGBT) discourse, and the minority rights of religious one and the rights for women.

This literature study refers to the determined theory and methodology with which collecting and analyzing data techniques utilizes. Data were obtained from studying Husein Muhammad's literature works from 1999 to 2019, but only those in line with the subject of the study were taken. In-depth interviews with Husein Muhammad and other relevant and competent individuals were also conducted. Then, the collected data were analyzed using the genealogy theory from Michel Foucault and hermeneutics Al-Qur'an.

The result shows that Husein Muhammad's interpretation of Al-Qur'an in his talks about contemporary human rights protection is a critical-advocative Al-Qur'an reciting practice. The power-knowledge relation involved moves productively both as a discourse producer and in the process of producing and

constructing of discourses. First, as a producer, power-knowledge relation goes through structural and cultural processes. Structurally, the relation takes Husein's position to go through, while interinstitutional intellectual meetings take the role culturally. Not only does he reveal behind the religious texts' meanings being polemicized nor does he criticize discriminative treatments towards certain groups, indeed, he struggles for implementing human rights protection. Second, in the process of producing discourses, the power works in collaboration among arguments, legitimacy, and authorization. It effectively controls the relation between power and the knowledge on human rights protection for those who undergo discrimination. Third, in the sense of product, he explores texts in Al-Qur'an and other traditional Islamic treasures by re-interpreting despite adoptedly-sensed human rights constructed by his power relation. With his technique, he soothed traditionalists Islam and other Muslims in Indonesia using the construction of human rights protection via the critical-advocative Qur'anic interpretation, which is actually an affirmative stand point against international human rights narration.

Keywords: Husein Muhammad, the Protection of Human Rights, Critical-Advocative Qur'anic Interpretation, Power-Knowledge Relation.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dijadikan pedoman bagi penulisan disertasi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2003. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah’....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....’.....	Fathah	A	a
.....	Kasrah	I	i
..... ^ˆ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukiro
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

D. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

F. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-aṭ fāl / raudatul aṭ fāl
2.	طَلْحَة	Ṭ alhah

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

H. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu /l/. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Adapun kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	ar-Rajulu
2.	الْجَلَالُ	al-Jalālu

I. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khudūna
3.	أَنْتَوُا	An-Nau'u

J. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-hamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna / fa aful kaila wal mīzān

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menyilipkan daya dalam setiap cita dan upaya yang ditempuh oleh anak manusia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan Sang Baginda Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pecinta serta pengikutnya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Direktur Pascasarjana Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program internasional di Jerman tahun 2015 semasa menempuh pendidikan S3 ini, Wakil Direktur Pascasarjana Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A., Kaprodi S3 Studi Islam Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D., para pengajar Program Studi Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan selama proses studi.

Penulis menyadari dengan sesungguhnya bahwa penulisan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua promotor: Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. dan Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.

Keduanya merupakan sosok inspiratif bagi kehidupan akademik penulis. Sepak terjang, produktifitas ilmiah, dan dedikasi akademis keduanya telah menjadi *role model* bagi langkah-langkah akademis penulis. Atas bimbingan beliau berdua, baik dalam bentuk saran maupun kritiknya, penelitian ini menemukan arah dan tujuannya. Meskipun keduanya memiliki tugas dan kesibukan yang demikian banyak, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, beliau

berdua senantiasa meluangkan waktu untuk mendiskusikan perkembangan disertasi ini, membimbing penulis dengan kritis dan tidak menjatuhkan, sehingga mendorong penulis lebih bersemangat untuk segera menyelesaikannya. Dukungan dan motivasi yang selalu diberikan oleh kedua promotor sangat membantu penulis untuk segera menyelesaikan karya ini.

Ungkapan terimakasih juga penulis haturkan kepada para penguji, Prof. Dr. Amin Abdullah, M.A., Dr. Inayah Rahmadiyah, M.A., M.Hum., dan Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., yang telah hadir dalam disertasi ini tidak hanya sebagai penguji namun juga pembimbing dan guru yang bersahabat. Rekomendasi dan kritik membangun yang mereka berikan telah turut mewarnai disertasi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada LPDP yang telah memberikan bantuan beasiswa untuk penyelesaian studi S3 ini. Terima kasih kepada semua informan penelitian ini, khususnya KH. Husein Muhammad, beserta seluruh jajaran pengurus di Fahmina Institute yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, diobservasi, maupun bantuan-bantuan lainnya dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini.

Terima kasih yang tak terdeskripsikan penulis sampaikan kepada perempuan tercinta yang telah banyak memberikan sentuhan semangat dan kasih sayangnya, juga pengorbanan dan dorongannya; Karimatul Khasanah. Sosok pendamping pujaan sekaligus ibu ideal yang telah sudi menunda sementara cita-cita akademisnya demi kebersamaan dan mendidik dua putri kecil kami; Alysia Zharufa Almagelsey dan Thibitalia Nahidlah Fauztina. Keberadaannya telah menyalakan setiap kali redup menyelimuti jiwa penulis saat hendak menyelesaikan disertasi ini.

Terimakasih tak bertepi juga penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya orang tua dan mertua, yang telah hadir sebagai pelita hidup penulis, yang tidak sekedar mendo'akan kehidupan terbaik bagi penulis beserta keluarga kecilnya, tapi juga mendo'akan dan mendukung sepenuhnya setiap langkah penulis saat menempuh studi doktoral ini. Tidak jarang mereka menanyakan, sudah sampai mana disertasi dan ujian yang ditempuh? Adakah

halangan dan kesulitan yang berarti? dan beberapa pertanyaan lainnya yang menyiratkan perhatian besar mereka kepada penulis.

Terima kasih yang mendalam juga penulis berikan kepada keenam saudara kandung penulis dan saudara ipar penulis. Terutama kakak pertama penulis, KH. Ahmad Sugeng Utomo yang telah turut mendorong dan mendukung penulis saat menempuh pendidikan S3 ini, baik secara materiil maupun moril. Berkat do'a dan dukungan mereka semua, penulis tetap konsisten dalam menyelesaikan studi S3 ini dengan segala lika-liku tantangan non-akademis yang penulis hadapi.

Terakhir, terimakasih kepada institusi dimana penulis mengabdikan bagi ilmu pengetahuan; Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam (PP.DAWAM) Yogyakarta. Atas pengertian yang diberikan, penyelesaian akhir penulisan disertasi ini bisa berjalan hingga sempurna. Semoga balasan terbaik dari Allah SWT dianugerahkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi terselesaikannya disertasi ini, baik yang penulis sebutkan atau pun yang luput untuk penulis tuliskan di pengantar ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan menyisakan kekurangan, maka kepada para pembaca sekalian, penulis berharap masukan, kritik, dan saran yang konstruktif.

Penulis,



Mohamad Sobirin
NIM. 1330016031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN REKTOR.....	ii
PERNYATAAN YUDISIUM.....	iii
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI.....	iv
BEBAS PLAGIARISM.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR TABEL.....	xxx
DAFTAR GRAFIK	xxxii
DAFTAR SINGKATAN	xxxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Kerangka Teori	23
G. Metodologi Peneltian.....	40
H. Sistematika Pembahasan.....	43
 BAB II WACANA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN DINAMIKA UMAT ISLAM INDONESIA KONTEMPORER.....	 47
A. Sejarah Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia Kontemporer.....	47
B. Islam Indonesia Kontemporer dan Respon terhadap Isu Hak Asasi Manusia di Indonesia	50
C. Islamisme dan Wacana Ideologis	56
D. Islam Sipil dan Aktivisme	60

E. Kontestasi Wacana Penafsiran Al-Qur'an tentang Hak Asasi Manusia antara Islamisme dan Islam Sipil	62
F. Islam Arus Utama: Demokratisasi Umat Islam dan Respon atas Hak Asasi Manusia	69
BAB III DINAMIKA HUSEIN MUHAMMAD SEBAGAI PRODUSEN WACANA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	79
A. Biografi Intelektual Husein Muhammad.....	79
B. Islam Tradisional dan Arena Distribusi Wacana..	86
C. Resistensi Islamisme	92
D. Husein Muhammad dan Aktivisme Sosial dalam Islam Sipil	94
E. Produk Wacana.....	131
BAB IV KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM WACANA KEAGAMAAN KONEMPORER HUSEIN MUHAMMAD.....	143
A. Wacana Hubungan Islam dan HAM Internasional	143
B. Wacana Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia	156
C. Wacana Perlindungan Kelompok Berorientasi Seksual Diluar <i>Mainstream</i>	162
D. Wacana Perlindungan Hak Minoritas Kelompok Beragama dan Berkeyakinan.....	175
E. Wacana Perlindungan Hak Perempuan Dari Kekerasan	202
BAB V PRAKTIK PEMBACAAN AL-QUR'AN DAN RELASI KUASA DALAM WACANA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA HUSEIN MUHAMMAD	221
A. Pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad dalam Wacana Tafsir Agama	222

1. Husein Muhammad dan Paradigma Kritis	222
2. Tafsir Agama Sebagai Wacana Advokatif	231
3. Dialektika dalam Pembacaan Kritis Advokatif	237
B. Dinamika Relasi Kuasa dalam Produksi Wacana	244
1. Relasi Kuasa dalam Wacana Perlindungan Kelompok Berorientasi Seksual Diluar <i>Mainstream</i>	251
2. Relasi Kuasa dalam Wacana Perlindungan Hak Minoritas Kelompok Beragama dan Berkeyakinan	256
3. Relasi Kuasa dalam Wacana Perlindungan Hak Perempuan Dari Kekerasan.....	260
C. Husein Muhammad dan Tantangan Gerakan Intelektualisme Kontemporer	263
BAB VII PENUTUP	271
A. Kesimpulan	271
B. Rekomendasi	273
DAFTAR PUSTAKA	275
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	295

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Aplikasi Operasional Analisis Genealogi terhadap Wacana Perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad	33
Tabel 2.	Taksonomi Wacana Perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad	43
Tabel 3.	Muslim di Indonesia Kontemporer	54
Tabel 4.	Daftar Buku Karya Husein Muhammad	132
Tabel 5.	Artikel Prolog, Epilog dan <i>Book Chapter</i> Karya Husein Muhammad	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Biografi Intelektual Husein Muhammad.....	85
Grafik 2. Isu Tematik dalam Buku dan Artikel Karya Husein Muhammad	141
Grafik 3. Konstruksi HAM Husein Muhammad	155
Grafik 4. Konstruksi Perlindungan HAM Perspektif Husein Muhammad dan <i>International Bill of Rights</i>	161
Grafik 5. Praktik Pembacaan Al-Qur'an Kritis Advokatif Husein Muhammad	243

DAFTAR SINGKATAN

DEPKUMHAM	: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DUHAM	: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
FKUB	: Forum Komunikasi antar Umar Beragama
FPI	: Front Pembela Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDH	: Hidup Dibalik Hidup
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ICRP	: <i>Indonesian Conference on Religion and Peace</i>
IPPF	: <i>International Planned Parenthood Federation</i>
ISIF	: Institute Studi Islam Fahmina
JAI	: Jemaat Ahmadiyah Indonesia
JIL	: Jaringan Islam Liberal
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Lakpesdam	: Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LGBT	: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
LPHAM	: Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MUI	: Majelis Ulama' Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

NRI	: Negara Republik Indonesia
OIC/OKI	: <i>Organization of the Islamic Conference</i>
ORMAS	: Organisasi Kemasyarakatan
P3M	: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBHI	: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
PD	: Perang Dunia
PELITA	: Pemuda Lintas Iman
POLMAS	: Perpolisian Masyarakat
RI	: Republik Indonesia
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TAF	: The Asia Foundation
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNHRC	: <i>United Nation Human Rights Council</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deklarasi perlindungan Hak Asasi Manusia internasional lahir dari sebuah kesadaran bersama warga masyarakat dunia mengiringi pungkasnya peperangan panjang yang telah menginjak-injak hak asasi mereka dan mengorbankan tidak sedikit umat manusia. Pada tahun 1948, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya menyepakati dan mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia).¹ Deklarasi perlindungan Hak Asasi Manusia internasional tersebut sebagai sebuah produk pemikiran, maka sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang membentuknya, seperti ideologi, politik maupun budaya yang melingkupinya. Perspektif ini menjadi alasan bagi adanya perdebatan oleh berbagai kalangan hingga saat ini menyangkut universalitas serta partikularitas hak-hak asasi manusia.

Sejak awal, masalah universalitas dan relativitas Hak Asasi Manusia merupakan sumber perdebatan dan bahkan pertengkaran. Hal itu dinyatakan oleh Steiner dan Alston sebagai berikut:

*“The question of the ‘universal’ or ‘relative’ character of the rights declared in the major instruments of the human rights movement has been a source of debate and contention from the movement’s start.”*²

Perdebatan antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan Hak Asasi Manusia internasional untuk skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*) telah mewarnai perbincangan seputar Hak Asasi Manusia

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1980), 120; dan Jimliy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), 152-162.

² Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral* (New York: Oxford University Press, 2000), 366.

internasional sejak awal hingga saat ini. Perdebatan ini terkait dengan dua teori yang memiliki pandangan yang saling bertolak belakang menyangkut gagasan dan penerapan hak asasi manusia, yaitu teori universalisme (*universalism theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*).³

Sejumlah negara Islam (yang tergabung dalam OKI) misalnya, menyambut naskah Hak Asasi Manusia internasional itu dengan berbagai keberatan karena bertumpu pada teori relativisme budaya. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) mereka mendeklarasikan dua naskah Hak Asasi Manusia internasional berbasis Islam yang dikenal dengan *The Universal Islamic Declaration of Human Rights* yang diadopsi oleh *The Islamic Council of Europe* pada 19 September 1981 dan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Kedua naskah ini telah diratifikasi oleh negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) pada tahun 1990.

Respon terhadap DUHAM juga diberikan oleh masyarakat Muslim dunia. Ada beberapa pandangan terhadap HAM internasional dalam ranah praksis kontemporer umat Islam, yang menurut Halliday -sebagaimana disebutkan oleh Mashood Baderin-bila dikategorikan maka terdapat empat pandangan yang berbeda, yaitu; pertama, pandangan yang menyatakan bahwa Islam selaras dengan hak asasi manusia internasional. Kedua, Hak Asasi Manusia

³ Prinsip teori universalis bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM yang dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau pun yang ada pada suatu negara. Kelompok pengusung universalisme berpandangan bahwa keberadaan kebenaran moral itu bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Pandangan ini merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Universalisme menyatakan bahwa asal muasal dan perkembangan HAM tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Sementara relativisme budaya, di sisi lain menolak pernyataan universalisme. Dalam pandangan relativisme, kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan kaidah moral dalam hak asasi manusia. Oleh karenanya, HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempersembahkan nilai seperti hak hidup serta kesetaraan martabat yang harus dihormati. Berdasarkan argumentasi ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila didominasi oleh suatu budaya tertentu. Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), 18-20.

sejati hanya bisa sepenuhnya diwujudkan di bawah ketentuan Islam. Ketiga, tujuan Hak Asasi Manusia internasional adalah agenda imperialis yang mesti ditentang. Keempat, Islam tidak selaras dengan Hak Asasi Manusia internasional. Ada tanggapan menarik kelima yang menurut Baderin telah dilewatkan oleh Halliday, yaitu pandangan bahwa Hak Asasi Manusia internasional memiliki tujuan agenda anti agama yang tersembunyi.⁴

Dalam pandangan Baderin, sebagian besar Muslim yang mendukung pendapat ketidakselarasan DUHAM dengan Islam sebenarnya tidak dalam kerangka menentang konsep Hak Asasi Manusia *per se*. Pendapat mereka lebih mencerminkan kekecewaan dan protes terhadap hegemoni Barat dan dengan demikian protes terhadap ideologi yang dianggap telah diperjuangkan oleh bangsa-bangsa Barat. Mereka kerap merujuk pada “standar-standar ganda” Barat dan ketimpangan umum mereka dalam memberikan reaksi atas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di bawah rezim-rezim “Islam” dan “non-Islam” sebagai bukti kurang tulusnya sistem Hak Asasi Manusia internasional.⁵

⁴ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terjemah oleh Musa Kadzim dan Edwin Arifin (Jakarta: Komnas HAM, 2010), 11-12. Lihat juga dalam versi aslinya; Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), 16.

⁵ *Ibid.*, 14. Baderin mengutip pandangan seorang kritikus Mesir, ‘Ismat Sayf al-Dawla, yang sering dikutip telah mencemooh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam kata-kata berikut:

“Saya mesti mengakui bahwa saya bukan pendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember, 1948. Sejarah peradaban kita telah mengajarkan kita untuk waspada terhadap kata-kata besar dan mulia, lantaran kenyataan sejarah kita mengajarkan bagaimana kata-kata besar dan mulia itu bisa beralih menjadi kejahatan- kejahatan keji. Kita tidak bisa melupakan bahwa para pemrakarsa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan warga biasa Perancis ialah orang-orang sama yang sejenis setelah itu, dan sebelum tinta pada lembaran Deklarasi mengering, menyusun serangan dan mengirimkan pasukan mereka di bawah jenderal favorit mereka, Napoleon, ke Mesir. Kita tidak bisa lupa bahwa Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun yang sama juga mengakui negara Zionis yang mencaplok Palestina dan merampas semua hak rakyat yang ditetapkan dalam Deklarasi, termasuk hak hidup.”

Pandangan terakhir, yang ditambahkan Baderin, bahwa tujuan Hak Asasi Manusia internasional mengandung agenda anti agama yang terselubung juga diakibatkan oleh beberapa kecurigaan di tengah-tengah Muslim, yaitu bahwa setelah adanya pemisahan Gereja dengan negara di dunia Barat, Barat berniat melakukan hal yang sama pada dunia Muslim. Melalui “*crusade*” Hak Asasi Manusia internasional, Barat ingin menggantikan keimanan Islam dengan ideologi baru humanisme internasional dalam upaya menyingkirkan religiusitas secara utuh dari tatanan dunia. Menurutny, ini bukan opini yang ditorehkan oleh pemerintahan-pemerintahan dunia Muslim saja, melainkan juga dipegang oleh banyak individu Muslim yang hendak dilindungi oleh Hak Asasi Manusia internasional.⁶

Polemik wacana Islam dengan Hak Asasi Manusia international yang dipaparkan Bederin di atas, dalam konteks Islam di Indonesia diuraikan oleh Gus Dur, bahwa peran yang dimainkan oleh Islam dalam bidang HAM di Indonesia ditentukan oleh dinamika ketegangan tiga kutub yang saling berhubungan. Kutub pertama, adalah yang berpandangan bahwa Islam sebagai suatu agama yang klaim universalnya melampaui keberadaan hak-hak asasi manusia. Kutub kedua adalah pandangan tentang hak asasi universal yang didasarkan konsep modern dan sekuler. Kutub ketiga adalah yang mengusulkan interpretasi dasar-dasar Hak Asasi Manusia oleh negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri.⁷

Dalam pandangan Gus Dur, Islam sebagai kekuatan politik dan sosial di Indonesia dipecah-belah dalam isu hak asasi manusia, khususnya dengan strategi kooptasi negara. Kelompok-kelompok Islam cenderung mendukung pandangan relativisme budaya terhadap Hak Asasi Manusia karena dua alasan, yang pertama adalah alasan ideologis dan yang kedua adalah alasan strategis. Alasan yang pertama adalah penolakan mereka terhadap nilai-nilai Barat dan

⁶ *Ibid.*, 14-15.

⁷ Muhammad A. S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society* (Erlangga, 2000), 26.

sekuler, sedangkan yang kedua adalah strategi jangka panjang islamisasi politik.⁸

Dalam situasi yang demikian, para pendukung Hak Asasi Manusia di kalangan kelompok Islam menghadapi tekanan yang besar dari kedua sisi, baik negara maupun kelompok-kelompok Islam. Suara mereka cenderung didiamkan, dipinggirkan dan bahkan ditekan, yang mempersulit mereka untuk berpartisipasi secara terbuka dalam diskursus dan praktek yang berkenaan dengan upaya advokatif dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia kelompok-kelompok terdiskriminasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, banyak diskursus dalam kasus-kasus Hak Asasi Manusia kontemporer di Indonesia yang memiliki hubungan dengan doktrin keislaman tidak banyak mendapatkan tanggapan bulat dari para pendukung HAM di kalangan kelompok Islam. Diantara diskursus yang dimaksud adalah menyangkut hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual yaitu LGBT, hak minoritas kelompok beragama/berkeyakinan seperti dalam kasus Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup, dan hak-hak kelompok ter subordinasi, yaitu perempuan. Oleh karenanya, wacana yang bergulir tentang ketiganya direspon oleh publik Islam di Indonesia sebagai sesuatu yang kontroversial.

Dalam kasus LGBT, gagasan umum yang digunakan masyarakat Indonesia untuk memandang kelompok ini, bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang terberi dan tidak dapat diubah. Pandangan ini selain ditopang oleh penjelasan ilmiah juga dikuatkan oleh doktrin agama dan budaya, sehingga kelompok orang yang seksualitasnya tidak seirama dengan cara berfikir konseptual pandangan tersebut dianggap sebagai abnormal. Hal ini yang menjadi alasan kenapa LGBT dinilai sebagai kelompok abnormal. Sebagai akibat dari pandangan ini, perlakuan diskriminatif dan kekerasan dianggap wajar untuk menghukumi kelompok LGBT yang dianggap tidak normal itu.

⁸ *Ibid.*, 34.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT sebagaimana dicatat oleh Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan meliputi 3 macam kekerasan; seksual, fisik dan emosional.⁹ Sementara itu, kelompok LGBT ini juga menerima perlakuan diskriminatif dari masyarakat, yaitu diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, diskriminasi dalam hal akses terhadap keadilan, dan diskriminasi dalam pemilihan pasangan.¹⁰ Gambaran secara nasional dan detail bagaimana orang-orang LGBT hidup di Indonesia dilaporkan oleh USAID-UNDP.¹¹ Sedangkan studi kasus yang memotret diskriminasi itu dilaporkan oleh Arus Pelangi bekerjasama dengan TIFA.¹²

Diskriminasi terhadap hak asasi warga negara di Indonesia tidak hanya diterima oleh kelompok LGBT di atas, perenggutan hak-hak asasi juga dialami oleh para pengikut Ahmadiyah. Diskriminasi itu berawal dari pandangan yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Berbagai seminar yang mengkaji Ahmadiyah, khususnya yang diadakan dan diprakarsai FPI dan LPPI di Masjid Istiqlal dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Masjid Al-Hurriyah IPB Bogor, di Masjid Al-As'ary UNISBA Bandung, atau buku-buku yang beredar umumnya menggiring opini tentang kesesatan Ahmadiyah. Lihat misalnya karya M. Amin Djameluddin yang berjudul *Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur'an*, dan tulisan Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*.¹³

Opini sebagian masyarakat di atas semakin mengkristal dan menjadi pandangan umum seiring dengan diterbitkannya Fatwa MUI

⁹ Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, "Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT) - Jalan Lain Memahami Hak Minoritas," (ttp.: t.p., t.t.)

¹⁰ United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, *Indonesia 2013 Human Rights Report-Country Reports on Human Rights Practices for 2013*, 2013.

¹¹ Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*, ed. ke-1 (Jakarta: Arus Pelangi & Yayasan Tifa, 2008).

¹² *Ibid.*

¹³ Moh. Sulhan, Asep Kurniawan, dan Dedi Djubaedi, *Kontestasi Tafsir Agama: Akar Kekerasan Minoritas dan Problem Pluralisme* (Kuningan: Crisis Press, 2007), 44–45.

Kuningan nomor 86/MUI-KFH/X/2004 tentang penyimpangan ajaran Ahmadiyah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Muspida, Pimpinan DPRD, MUI, dan Ormas Islam tertanggal 3 Nopember 2003 tentang pelarangan Jama'ah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.

Akibat fatwa dan SKB tersebut, kebebasan Ahmadiyah dalam melaksanakan aktifitas ibadah menjadi terenggut. Tuntutan pembubaran semakin memuncak dan buntutnya berupa perusakan 38 rumah milik jama'ah Ahmadiyah, penyegelan tempat ibadah dan masjid dan tempat pendidikan milik Ahmadiyah. Perilaku yang ditujukan ke Ahmadiyah ini disebut sebagai bentuk hukuman akibat tidak diindahkannya fatwa dan SKB tersebut. Tidak sampai disitu saja, orang-orang Ahmadiyah juga tidak bisa memperoleh KTP, tidak diproses pernikahannya, dan harus mencari tempat lain di luar Kuningan.¹⁴

Disharmoni di atas akhirnya mencuat menjadi isu nasional yang direspon oleh MUI Pusat dan Pemerintah Pusat. Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M./19-22 Jumadil Akhir 1426 H, dengan menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai *murtad* (telah keluar dari Islam). Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.¹⁵

Setelah Indonesia dihebohkan oleh label sesat yang alamatkan kepada Ahmadiyah di atas, pada akhir 2007 riak-riak penyesatan juga mulai digulirkan dan dialamatkan kepada tidak sedikit komunitas keyakinan dan keagamaan di Indonesia, di antaranya adalah yang berada di Cirebon, yaitu HDH (Hidup Dibalik Hidup).

¹⁴ *Ibid.*, 78–79.

¹⁵ Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, "Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah," dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (MUI Pusat, 2009), 106-118.

Bukan hanya masyarakat yang menyesatkan komunitas ini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Cirebon pun mengeluarkan fatwa dan menyatakan bahwa HDH adalah sesat.¹⁶ Pernyataan kesesatan HDH diperkuat oleh kesimpulan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat.¹⁷

Apabila diskriminasi hak-hak asasi pada kasus di atas dilatarbelakangi oleh pandangan yang menyatakan LGBT sebagai kelompok menyimpang dari kodrat dan abnormal, sementara Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup sebagai aliran sesat, maka diskriminasi Hak Asasi Manusia yang diterima oleh perempuan di Indonesia dilatarbelakangi oleh pandangan patriarkhis yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk subordinat, yang berakibat pada marjinalisasi mereka sehingga berujung pada kekerasan terhadap mereka.

Praktik marjinalisasi terhadap kaum perempuan terjadi di berbagai arena, mulai dari dalam pekerjaan hingga di masyarakat, rumah tangga dan bahkan negara. Proses yang melatarbelakangi marjinalisasi bisa berasal dari tafsir keagamaan. Sebagai contoh, tafsir agama yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, perempuan adalah bagian dari (tulang rusuk) laki-laki, dan bagian warisan perempuan dengan jumlah setengah dari bagian laki-laki.¹⁸

Fenomena diskriminasi hak-hak asasi terhadap kelompok-kelompok sosial di atas telah menarik perhatian dari sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Human Rights Council*), sehingga mereka mempertanyakan proteksi negara Indonesia atas kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan kebebasan berekspresi. Sidang tersebut menghasilkan rekomendasi yang tertuang dalam *Universal Periodic Review*. Dalam tinjauan berkala tentang pelaksanaan HAM oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, Indonesia dipersoalkan komitmennya

¹⁶ Marzuki dan Agus Idris, "Polemik Tuduhan Sesat Majelis Ta'lim Hidup Dibalik Hidup (DHD) Cirebon," dalam *Membangun Kebersamaan dalam Keragaman; Potret Dari Cirebon* (Cirebon: Fahmina Institute, 2014), 9.

¹⁷ *Ibid.*, 14.

¹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

menyangkut empat hal berkaitan dengan Hak Asasi Manusia; pertama, toleransi; kedua, kebebasan beragama; ketiga, minoritas; dan keempat, penghormatan pada perempuan.¹⁹

Husein Muhammad merupakan seorang ulama' yang hidup di tengah hegemoni pandangan umum masyarakat Indonesia yang berujung pada terjadinya diskriminasi hak-hak asasi warga negara Indonesia di atas (LGBT, Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup, dan perempuan). Namun, ia justru menunjukkan pandangan-pandangan yang menentang dan berseberangan dengan gagasan umum tersebut. Ia bahkan secara tegas menunjukkan keberpihakan dirinya pada penyemaian ide-ide Hak Asasi Manusia dalam ruang kehidupan Indonesia kontemporer. Selain memproduksi wacana-wacana bertajuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang berbasis pada pembacaan Al-Qur'an,²⁰ ia juga melakukan berbagai upaya untuk mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok sosial yang mengalami diskriminasi di Indonesia di atas.

Husein Muhammad atau Buya Husein –begitu sapaan akrabnya– dalam menanggapi berbagai isu dan kasus Hak Asasi Manusia di

¹⁹ Disarikan dari transkrip wawancara *Human Rights Wacht Group* dan Komnas Perempuan (Kompas, 22 Mei 2012), 3. HAM yang dipersoalkan oleh Dewan HAM PBB di atas penulis jadikan sebagai kerangka umum dalam riset ini untuk mengungkap diskursus-diskursus Husein Muhammad di tengah kontestasi Islam Indonesia terhadap wacana HAM Pasca Orde Baru. Sementara itu, kajian HAM dalam penelitian ini mengacu pada kasus spesifik HAM di Indonesia yang merupakan bagian dari empat isu yang disinggung dalam *Universal Periodic Review* di atas. Kajian yang penulis maksudkan yaitu; (1) Hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual yaitu LGBT, (2) Hak minoritas kelompok beragama/berkeyakinan dalam kasus Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup dan (3) Hak perempuan.

²⁰ Istilah “Pembacaan Al-Qur'an” pada penelitian ini bukan berarti “*tilawah*” ataupun “*qira'ah*” sebagaimana yang digunakan dalam MTQ (*Musabaqah Tilawah Al-Qur'an*), namun ia memiliki arti yang sama dengan penafsiran Al-Qur'an yang dalam bahasa Arab disebut dengan “*tafsir*” atau *ta'wil*”. Penulis menggunakan istilah ini dalam beberapa tempat dengan alasan bahwa pertama, penggunaan istilah pembacaan merujuk pada salah satu istilah dalam triadik hermeneutik yang menggunakan kata *reader* (pembaca) dengan arti *mufassir* (penafsir), dan kedua, istilah pembacaan sering digunakan oleh para tokoh dalam studi Al-Qur'an kontemporer untuk menunjukkan aktifitas yang sama dengan aktifitas penafsiran itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan makna antara pembacaan dengan penafsiran dalam penggunaannya di penelitian ini, keduanya memiliki arti yang sama sebagai aktifitas penafsiran.

Indonesia kontemporer di atas berada pada kategori yang disebut oleh Baderin sebagai kalangan Islam yang berpandangan bahwa Islam selaras dengan Hak Asasi Manusia internasional, dan dalam istilah Gus Dur disebut sebagai pendukung Hak Asasi Manusia di kalangan kelompok Islam. Oleh karena itu, Husein Muhammad mengupayakan berbagai argumen dalam wacana yang ia produksi tentang hubungan antara Islam dengan Hak Asasi Manusia dan mempersoalkan pandangan kelompok Islam yang menolak DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) dengan menganggap Deklarasi Kairo sebagai penggantinya.²¹

“Adalah menarik untuk mengemukakan sebuah deklarasi Hak Asasi yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi Kairo ini merupakan dokumen Hak Asasi Manusia di tingkat regional yang secara khusus ditujukan bagi Negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dengan statusnya yang demikian, deklarasi ini bukan merupakan pengganti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melainkan dapat melengkapinya. Karena itu ia merupakan deklarasi Hak Asasi Manusia menurut Islam”²²

Respon Husein Muhammad terhadap diskriminasi hak-hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan sebagaimana yang disoroti oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNHRC*) di atas, ia tunjukkan melalui produksi wacana yang berseberangan dan menantang pandangan umum di lingkungan kulturalnya (dunia pondok pesantren), wilayah regionalnya di Cirebon dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentang ketiga entitas manusia yang didiskriminasikan itu. Di antara topik dalam wacana yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad adalah tentang toleransi,²³

²¹ Husein Muhammad, “Wawancara dengan K.H. Husein Muhammad di Ponpes Darut Tauhid Arjowinangun Cirebon Jawa Barat,” 6 Juni 2016.

²² Husein Muhammad, “Islam dan HAM,” 28 April 2012.

²³ Husein Muhammad, *Toleransi Islam; Hidup Damai Dalam Masyarakat Plural* (Cirebon: Fahmina Institute, 2015), 2–5.

kebebasan beragama;²⁴ disingkirkannya hak-hak kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah dan LGBT;²⁵ hingga penghormatan pada perempuan.^{26,27}

Dengan melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Husein Muhammad menggarisbawahi wacana perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut bahwa Al-Qur'an sebagai sumber norma bagi umat Islam, sejatinya memerintahkan mereka untuk berlaku dan bersikap adil kepada semua orang, baik kawan maupun lawan, orang saleh maupun pendosa, orang kaya maupun miskin, muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Keadilan harus ditegakkan dalam kondisi dan situasi apapun. Semua orang, apapun agama, etnik, ras, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksualnya, harus diperlakukan secara setara dan adil.²⁸

Selain giat memproduksi wacana yang mempersoalkan pandangan umum masyarakat Indonesia dalam diskursus Hak Asasi Manusia kontemporer di atas, –yang juga menjadikan Husein Muhammad dikenal sebagai figur yang berpihak pada perlindungan Hak Asasi Manusia adalah– ia juga aktif melakukan aktivisme sosial bersama dengan jejaring aktivis Hak Asasi Manusia di Indonesia. Praktik aktivisme sosial pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid ini dalam Hak Asasi Manusia dilakukan secara tersistem dan terorganisir melalui lembaga yang didirikannya, yaitu Fahmina Institute, dan dengan keterlibatannya di dalam LSM-LSM yang mengusung wacana dan gerakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Balqis, Wahid Institute, Desantara, KPPI, ICIP, dan PKBI. Oleh karena itu, di luar aktivisme

²⁴ *Ibid.*, 20.

²⁵ Husein Muhammad, “Wawancara dengan K.H. Husein Muhammad di Ponpes Darut Tauhid Arjowinangun Cirebon Jawa Barat.” 6 Juni 2016.

²⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Fahmina Institute, 2004), 80.

²⁷ Husein Muhammad, “Khazanah: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Perspektif Islam),” dalam *Tanasul: Risalah Kesehatan untuk Kemaslahatan*, Vol. 20, Maret 2015.

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), 49.

sosial yang dilakukan bersama dengan mereka, wacana-wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad pun juga banyak yang diterbitkan dan dihadirkan di tengah publik atas kerjasama yang ia jalin dengan mereka.

Dengan demikian, pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah wacana yang ditopang oleh aktivisme sosialnya diatas, jika ditinjau dari perspektif pembacaan Al-Qur'an maka tidak bisa dilepaskan dari berbagai unsur hermeneutis yang berkelindan, mulai dari konteks sosio kultural dalam kesejarahannya,²⁹ psikologi individualnya,³⁰ paradigma yang ia gunakan,³¹ hingga beberapa unsur lainnya yang termasuk dalam subjektifitasnya. Sementara itu, dengan menggunakan perspektif Foucault yang menyatakan bahwa tidak ada wacana tanpa dipengaruhi kuasa, demikian juga sebaliknya, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan,³² maka pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia sebagai sebuah wacana, tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa pengetahuan yang turut mempengaruhi.

Wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad tentang hubungan integratif antara Islam dengan Hak Asasi Manusia dan kritiknya terhadap pandangan kelompok Islam yang menolak DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) misalnya, jika ditilik dengan perspektif Foucault di atas, harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Karena wacana Husein Muhammad tersebut diproduksi di atas panggung yang disediakan oleh keduanya. Begitu pula pandangan Husein Muhammad yang mengulas hak-hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT),

²⁹ Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld Publication, 1997), 76.

³⁰ Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991), 61.

³¹ Grant S. Osborne, *The Hermeneutical Spiral* (Downer Grove, Illinois: Intervarsity Press, 1991), 401.

³² Michel Foucault, *Power/Knowledge* (UK: Harvester Press, 1982), 27.

hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan, menunjukkan adanya banyak relasi kuasa yang berkelindan dalam proses produksi wacananya.

Dalam wacana perlindungan hak-hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), ia ditopang oleh PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) dan lembaga internasional. PKBI menjadi sponsor dalam proses produksi dan penerbitan wacananya itu. Sementara dalam wacana perlindungan hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dirinya sebagai aktivis di Fahmina Institute, Komisioner dan Dewan Etik di Komnas Perempuan, dan relasinya dengan Gus Dur, Lakpesdam NU, dan para pemikir dan aktivis Islam progresif serta NGO-NGO Islam Sipil di Indonesia.

Keberadaan Komnas Perempuan, PKBI, berbagai tokoh dan jejaring NGO Islam Sipil dalam proses produksi wacana Husein Muhammad, dalam berbagai bentuk peran yang berbeda-beda, mengindikasikan adanya relasi kuasa mereka terhadap pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Relasi kuasa ini paling tidak memunculkan tiga persoalan akademik. *Pertama*, tentang beroperasinya hubungan kepentingan dari organ-organ tersebut disamping kepentingan Husein Muhammad sendiri sebagai produsen wacana tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer. Ada kepentingan apa mereka memberikan beragam bentuk dukungan kepada Husein Muhammad untuk memproduksi wacana tentang perlindungan Hak Asasi Manusia?.

Kedua, tentang pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah wacana yang diproduksi di tengah demokratisasi Islam di Indonesia dan bersamaan dengan menguatnya polemik isu diskriminasi terhadap hak-hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan.

Dalam poin ini, bagaimana Hak Asasi Manusia secara umum dan secara khusus yang menyangkut hak-hak asasi minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan, dikonstruksi oleh Husein Muhammad di tengah situasi sosial politik di Indonesia kontemporer? Apakah konstruksi hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia dalam berbagai isu diskriminasi di Indonesia kontemporer yang dia rumuskan sekedar mewakili dan mengukuhkan kepentingan relasi-relasi kuasanya?

Ketiga, tentang alasan Husein Muhammad memproduksi wacana-wacananya tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembacaan Al-Qur'an kontemporer melalui dan dalam jejaring Islam Sipil dan pemerintahan. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa Husein Muhammad tidak lebih menempuh jalan yang lain dengan memproduksi wacana-wacananya tersebut secara mandiri tanpa mengupayakan legitimasi dan dukungan dari mereka? Apakah hal ini merupakan teknik, strategi, dan bentuk upayanya agar wacana polemik dan minor yang dia produksi tidak mendapatkan respon resisten dan bahkan bisa diterima oleh audien wacana yang dituju? Dalam istilah Foucault disebut normalisasi, yaitu bahwa setiap wacana dikonstruksi agar menjadi norma atau aturan yang dianut dan dirujuk dalam bersikap dan berperilaku. Disiplin merupakan teknik normalisasi wacana sehingga menjadi kekuasaan yang diterima.

Ketiga problem akademik di atas menjadi dasar disertasi yang menekankan fokus kajian pada perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembacaan Al-Qur'an kontemporer Husein Muhammad ini disusun dalam kerangka kerja penelitian akademik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan dalam rangka agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka penulis menyusun rumusan masalah penelitian ini dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wacana tafsir agama kontemporer Husein Muhammad?

2. Bagaimana praktik pembacaan Al-Qur'an dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang diproduksi oleh Husein Muhammad?
3. Bagaimana dinamika produksi wacana dan relasi kuasa dalam pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendorong dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Memaparkan konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wacana tafsir agama kontemporer Husein Muhammad.
2. Menguraikan praktik pembacaan Al-Quran dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang diproduksi oleh Husein Muhammad.
3. Menjelaskan dinamika produksi wacana dan relasi kuasa dalam pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
4. Menguraikan normalisasi wacana perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer di Indonesia yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang relasi antara diskursus Hak Asasi Manusia pasca kontemporer dengan penafsiran Al-Qur'an oleh seorang tokoh – dalam penelitian ini yaitu Husein Muhammad– yang dikaitkan dengan realitas demokratisasi umat Islam Indonesia ini merupakan kajian pemikiran tokoh kontemporer dalam Studi Al-Qur'an.

Penelitian ini, oleh karena itu, bermanfaat dalam mengungkap aspek genealogis pemikiran tokoh yang mendialogkan Al-Qur'an dan perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer di Indonesia, dan menganalisis relasi kuasa pemikirannya dengan jejaring aktivisme sosial kemanusiaan. Potret relasi kuasa dalam intelektualisme Al-Qur'an dengan jejaring aktivisme sosial yang diformulasikan oleh seorang pemikir dalam studi Qur'an –dalam hal ini Husein

Muhammad– dimaksudkan agar memberikan manfaat juga bagi pengembangan paradigma penafsiran Al-Qur'an kontemporer.

Selain manfaat di atas, penelitian terhadap pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks demokrasi Indonesia ini akan memberikan kontribusi lain bagi studi Qur'an berupa diungkapnya gambaran tentang posisi dan keterlibatan keserjanaan Al-Qur'an dalam merespon, membincang dan menyikapi secara praksis isu-isu Hak Asasi Manusia kontemporer. Gambaran ini bisa menjadi kerangka pijak bagi dinamisasi studi Al-Qur'an untuk kemanusiaan, serta pemikiran dan gerakan sosial-keagamaan umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer.

E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis memetakan dua kluster objek kajian yang berhubungan dengan kajian dalam disertasi ini. Dua kluster tersebut adalah: *pertama*, yaitu kajian tentang pemikiran Husein Muhammad, dan *kedua* yaitu kajian tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer yang dikaitkan dengan wacana keislaman.

Kajian terhadap pemikiran Husein Muhammad telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada tahun 2012 misalnya, Tutik Hamidah melakukan studi kritis terhadap *ushul fiqh* dengan mengevaluasi metode *istinbath* yang digunakan oleh Husein Muhammad dalam mereaktualisasikan fiqh perempuan berbasis kesetaraan gender. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu ushul fiqh, dengan menganalisa penggunaan metode *istinbath* yang digunakan Husein Muhammad dengan ilmu ushul fiqh. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini bahwa metode *istinbath* Husein Muhammad dilakukan dengan meletakkan aspek ideal Al-Qur'an sebagai landasan untuk memahami ayat-ayat yang menjelaskan peraturan tertentu. Sementara ayat yang menjelaskan peraturan tertentu harus dipahami secara kontekstual. Dengan metode itu, hukum Islam menjadi fleksibel. Metodenya adalah kombinasi dari *kullīyyāt-juziyyāt* milik Imam Syatibi, *taghyīr al-hukm* produk Imam

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Muhammad Musthafa Syalabi. Dengan demikian, metode yang digunakan oleh Husein Muhammad bukanlah penyimpangan dari ilmu pengetahuan Ushul Fiqh dan bisa dijadikan alternatif metode pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.³³

Pada tahun berikutnya, 2013, masih dalam perspektif disiplin hukum Islam namun bukan dalam wilayah metodologis yang substantif, Samsul Zakaria meneliti pemikiran Husein Muhammad yang dikomparasikan dengan pemikiran Musdah Mulia dalam isu kepemimpinan perempuan. Dengan perspektif hukum Islam, Zakaria menganalisis pemikiran keduanya dan menyimpulkan bahwa Husein Muhammad berpandangan jika Syariah tidak menyuguhkan secara tegas ajaran praktis tentang kepemimpinan perempuan. Namun secara substantif, Syari'ah menggariskan doktrin bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di ruang publik.³⁴

Penelitian yang bermaksud mengungkap nalar feminis dalam pemikiran Husein Muhammad di atas, ditarik ke dalam pertanyaan yang lebih fundamental oleh peneliti yang lain, yaitu Susanti.³⁵ Ia mempertanyakan pemikiran feminisme Husein Muhammad dengan mengajukan pertanyaan; manakah yang paling tepat antara memasukkan Husein Muhammad ke dalam kategori feminis Muslim atau kah feminis liberal? Untuk menjawab pertanyaan ini, Susanti justru tidak mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan di atas, ia menelaah pemikiran Husein Muhammad yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Analisis sosiologis yang dia gunakan, menghasilkan kesimpulan Husein Muhammad lebih tepat dikelompokkan sebagai feminis Muslim.

³³ Tutik Hamidah, "Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh Jumhur 'Ulama (Studi Metode Istinbath Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender", dipresentasikan di 12th AICIS (*Annual International Conference on Islamic Studies*), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

³⁴ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia," dalam Jurnal *KHAZANAH*, Vol. 6 No.1 Juni 2013.

³⁵ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Muslim dan Feminis Liberal", dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014.

Argumentasinya karena ia masih mengakomodir doktrin-doktrin Islam dalam mengulas isu feminisme.

Kesimpulan yang dipaparkan oleh Tutik Hamidah pada risetnya tahun 2012 di atas, diperkokoh oleh riset yang dilakukan oleh Marhumah (2016). Jika riset Hamidah menyimpulkan bahwa *istinbath* hukum Husein Muhammad memiliki akar dalam Ushul Fiqh, maka “*istinbath*” Husein Muhammad dalam membaca hadits misogynis memiliki akar dalam tradisi ulumul hadits, yaitu kritik *sanad* dan *matan*. Penelitian ini sekaligus memperkuat argumentasi bagi kesimpulan Susanti (2014) bahwa Husein Muhammad adalah feminis Islam, bukan feminis liberal. Karena *istinbath* dan metode kritik haditsnya masih memegang disiplin ushul fiqh dan ulumul hadits.³⁶

Orientasi yang dirancang pada penelitian Marhumah di atas adalah untuk mengungkap paradigma yang digunakan oleh Husein Muhammad ketika membaca teks Hadits. Kesimpulan yang ditunjukkan adalah kritisisme sebagai paradigma membaca teks Hadits. Argumentasinya adalah bahwa Husein Muhammad tidak sekedar menerima teks berdasarkan otentisitasnya, namun juga konten yang dikandungnya. Peneliti akan menguji temuan itu, dalam objek teks yang berbeda, yaitu Al-Qur'an. Apakah paradigma kritis tersebut juga diberlakukan oleh Husein Muhammad ketika membaca teks Al-Qur'an? Jika iya, apakah sepenuhnya sama atau adakah perbedaan? Peneliti berhipotesis bahwa akan ada perbedaan, khususnya pada aspek-aspek aktualisasi pembacaannya dalam ruang praksis.

Sementara itu, penelitian terbaru terhadap Husein Muhammad tidak meninjau pemikiran Husein Muhammad dari perspektif hukum Islam dan hadits sebagaimana sebelum-sebelumnya, namun mengkaji pemikiran Husein Muhammad dari perspektif studi Al-Qur'an. Meskipun demikian isu yang dikemukakan dalam kajiannya masih dalam satu payung diskursus tentang isu gender. Tobroni (2017)

³⁶ Marhumah, “A Critical Reading on Hadīth: Islamic Feminist Approach in Reading Misogynistic Hadīth”, dalam *Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 21, Issue 8, Ver. 8 (August, 2016).

menyimpulkan dalam penelitiannya ini, bahwa Husein Muhammad selalu mempertimbangkan faktor-faktor sosio-historis Al-Qur'an dalam kajian seksualitas yang ia paparkan.³⁷ Selain Tobroni, Yusuf Rahman (2017), juga meneliti Husein Muhammad, namun dari aspek pendekatan yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat gender dan kitab kuning, serta aktivismenya dalam mengarusutamakan wacana gender di dunia pondok pesantren.³⁸ Temuan yang dipaparkan oleh Yusuf Rahman tersebut masih terlihat deskriptif, sebagaimana yang pernah penulis paparkan satu tahun sebelumnya, yaitu saat menjadi salah satu *selected presenters* pada AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) yang berlangsung di UIN Raden Intan Lampung, tahun 2016. Pada artikel penulis yang berjudul "*The Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama's Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for World Humanity?*" paparan lebih fokus pada upaya Husein Muhammad dalam mengintegrasikan antara wacana HAM internasional dengan perspektif Islam baik dalam bentuk wacana maupun dalam aktivismenya.³⁹

Bagi peneliti, temuan Tobroni dan paparan Yusuf Rahman, di atas barangkali benar, namun perlu dikaji juga dalam topik-topik yang lain seperti Hak Asasi Manusia dalam ranah praksis kehidupan demokrasi kontemporer. Karena peneliti memiliki asumsi, bahwa penafsiran Husein Muhammad terhadap teks agama Islam (baik Al-Qur'an maupun Kitab Kuning), justru lebih dominan mempertimbangkan faktor praksis kekinian yang sarat akan kepentingan relasi kuasanya dibandingkan faktor sosio historis. Pada

³⁷ Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an menurut Husein Muhammad", dalam Jurnal *Al-'Araf*, Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017.

³⁸ Yusuf Rahman, "Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad, The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Quran Based Activism", dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55, no.2 (2017), 293-326.

³⁹ Mohamad Sobirin, "The Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama's Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for World Humanity?." Artikel *selected presenters* dipresentasikan pada AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) yang diselenggarakan di UIN Raden Intan Lampung, 2016.

penelitian ini, argumentasi penelitian Tobroni dan Yusuf Rahman di atas, dan asumsi peneliti sendiri akan diuji.

Ketujuh penelitian di atas, secara material empat diantaranya tidak menunjukkan hubungan identik dengan penelitian penulis. Karena topik yang dikaji dalam figur Husein Muhammad adalah pemikirannya tentang perempuan; pemberdayaan, penafsiran teks, dan metode *istinbath* hukum. Sedangkan tiga darinya, termasuk penelitian penulis sendiri pada tahun 2016, memiliki hubungan namun tidak dengan fokus yang sama. Penelitian penulis ini mencakup objek material berupa wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad tentang relasi Muslim dengan kelompok minoritas berdasarkan kepercayaan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup), kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual (LGBT), dan akar teologis kekerasan yang dialamatkan kepada perempuan. Meskipun demikian penelitian-penelitian tersebut akan menjadi rujukan sekunder yang memperkaya penjelasan akademik tentang siapa Husein Muhammad dan bagaimana ia menerima dan memberlakukan teks Islam pada saat mengetengahkan isu-isu kontemporer.

Adapun penelitian yang mengetengahkan objek kajiannya pada hubungan antara Islam dengan perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer di Indonesia, paling tidak ada tiga yang signifikan untuk penulis uraikan pada kajian pustaka ini. Penelitian Reni Susantri berjudul *When Human Rights become so Political; State-Islam Relations and Its Impact on the Ahmadiyya Community in Indonesia*⁴⁰ adalah salah satu dari tiga penelitian yang penulis maksudkan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara negara dan Islam di Indonesia, dan bagaimana hubungan tersebut telah berpengaruh terhadap kinerja negara dalam melakukan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas di Indonesia dalam konteks kebebasan beragama, yang secara khusus menekankan fokus objek kajiannya pada Ahmadiyah.

⁴⁰ Reni Susantri, *When Human Rights become so Political; State-Islam Relations and Its Impact on the Ahmadiyya Community in Indonesia* (The Netherlands: Institute of Soccial Studies, 2008).

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam hubungan antara Islam dan negara yang dipengaruhi oleh motif politik. Dengan pendekatan historis, penelitian ini menampilkan pergeseran hubungan itu dari era orde lama, orde baru, dan pasca reformasi. Penelitian ini juga membuktikan, bahwa kinerja negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama kelompok minoritas Ahmadiyah sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik.

Temuan penelitian Susantri di atas berbeda dengan yang diungkapkan oleh Syamsul Arifin dalam penelitiannya yang berjudul *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia (Voices of Islamic Religious Leaders in East Java)*.⁴¹⁴² Perbedaan penelitian yang disponsori oleh *the Norwegian Centre for Human Rights Universitas Oslo* ini dengan penelitian Susantri lebih disebabkan oleh fokus yang berbeda. Apabila penelitian Susantri memiliki fokus pada kinerja negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, maka penelitian Arifin ini fokus pada pandangan tokoh Islam terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan mengeksplorasi pendapat dari tokoh agama Islam di Jawa Timur, penelitian ini mengungkap pandangan mereka mengenai hubungan agama dengan negara (agama resmi dan identitas agama dalam KTP), isu mayoritas dan minoritas (pembangunan tempat

⁴¹ Syamsul Arifin, *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java* (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

⁴² Penelitian Syamsul Arifin yang lain –yang bercorak relasi HAM dan Umat Islam Indonesia– dimuat dalam bentuk paper di Jurnal *Brigham Young University Law Review*, Volume 2012, Issue 3, Article 4, dengan judul “*Indonesian Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives*”. Penelitian pada jurnal tersebut cakupannya cenderung lebih luas tidak terbatas pada daerah tertentu, begitupula metodenya bukan observasi lapangan. Arifin mendasarkan objek kajiannya pada pendapat Azyumardi Azra dan Arskal Salim yang mesinyalir empat perkembangan hubungan umat Islam Indonesia dengan HAM. *Pertama*, munculnya partai politik berideologi Islam seperti PBB. *Kedua*, perubahan arah ideologi berupa *syariatisasi* seperti Perda Syariah. *Ketiga*, munculnya aliran-aliran garis keras Islam seperti HTI, FPIU, MMI. *Keempat*, semakin populernya media-media Islam seperti *Sabili*. Keempat perkembangan keagamaan ini dapat menggambarkan hubungan Islam dengan HAM yang dikelompokkan dalam kelompok inklusif dan eksklusif.

ibadah minoritas, pernikahan antar agama, dan kemurtadan), dan kelompok minoritas yang anti-mainstream keagamaan Islam (Ahmadiyah, Yusman Roy, dan Lia Aminuddin-Lia Eden). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dalam bentuk ide-ide tentang HAM, misalnya mengenai kebebasan beragama. Perbedaan dalam menyoal kebebasan beragama terjadi pada landasan teologis di mana kesadaran ini didasarkan. Hal itu tergantung pada interpretasi yang diberikan kepada sumber teologi Islam paling utama, yaitu Al-Qur'an.

Penelitian berikutnya adalah disertasi karya S.J. van Wichelen berjudul *Embodied Contestation: Muslim Politics and Democratization in Indonesia through the Prism of Gender*.⁴³ Penelitian Wichelen ini memiliki perbedaan objek kajian spesifik dengan dua penelitian di atas, penelitian ini fokus pada persoalan perlindungan perempuan di Indonesia dalam perspektif gender. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan akademik tentang bagaimana politik dan upaya demokratisasi umat Islam Indonesia dilakukan melalui isu gender. Temuan penelitian yang fokus pada tiga isu gender Pasca Orde Baru ini (polemik presiden wanita RI –Megawati, Inul Daratista, dan fenomena Jilbab) menunjukkan bahwa wacana gender di Indonesia dibangun secara sengaja dan dalam kerangka politis.

Keterkaitan penelitian-penelitian di atas dengan disertasi ini terletak pada wacana Hak Asasi Manusia kontemporer yang dijadikan fokus kajian, seperti hak kebebasan beragama dalam konteks relasi mayoritas-minoritas, dan wacana gender. Meskipun demikian, secara spesifik kajian terhadap wacana itu sangat berbeda, karena objek yang berbeda, baik dari lokus dan juga isu spesifiknya, begitu pula teori dan pendekatan penelitiannya. Perbedaan pada beberapa unsur penelitian ini menunjukkan kemungkinan besar perbedaan pada temuan penelitian.

⁴³ S.J. van Wichelen, *Embodied Contestation: Muslim Politics and Democratization in Indonesia through the Prism of Gender* (Amsterdam: Institute for Social Science Research, 2007).

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua perangkat kerja analisis, yaitu: *pertama*, teori genealogi yang digagas oleh Michel Foucault, karena mempertimbangkan rumusan masalah yang menghendaki penjelasan mengenai relasi kuasa dalam konstruksi wacana perlindungan Hak Asasi Manusia dalam pembacaan Al-Qur'an kontemporer Husein Muhammad, *kedua*, teori hermeneutika Al-Qur'an. Teori ini diperlukan untuk menguraikan pembacaan Al-Quran yang dipraktikkan oleh Husein Muhammad dalam wacana-wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang dia produksi.

1. Genealogi Michel Foucault

Definisi sederhana dari genealogi Foucault adalah semacam ilmu sejarah. Namun, ia adalah tipe ilmu sejarah tertentu.⁴⁴ Genealogi Foucault berusaha mendekonstruksi apa yang sebelumnya dianggap sebagai suatu yang terpadu (*unified*), sementara itu juga mencoba mengidentifikasi suatu kesinambungan (*continuity*) yang merupakan produk dari “sistematika diskontinuitas”.⁴⁵ Selain itu, berbeda dengan filosofi sejarah Hegelian dan Marxis, genealogi Foucault bukanlah proyek (sejarah) holistik tetapi sebuah proyek (sejarah) perspektif. Genealogi menggali relasi kekuatan yang beroperasi secara khusus dalam peristiwa dan perkembangan sejarah. Foucault menggambarkan genealoginya sebagai “sejarah efektif”.⁴⁶

Genealogi Foucault menghilangkan asumsi yang mendasari historiografi konvensional bahwa ada “fakta” untuk ditafsirkan;

⁴⁴ Foucault mengatakan: “Dan inilah yang saya sebut genealogi, yaitu bentuk sejarah yang dapat menjelaskan proses terbentuknya pengetahuan, wacana, domain benda dan lain-lain, tanpa harus mengacu pada subjek, baik transendental dalam kaitannya dengan bidang peristiwa atau berjalan di ruang kosong sepanjang jalannya sejarah. Michel Foucault, “Truth and Power”, dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1971-1977*, ed. C. Gordon, trans. C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, K. Soper (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1980), 117.

⁴⁵ M. Foucault, “The Order of Discourse”, dalam *Untying the Text: A Post-Structuralist Reader*, ed. R. Young (Boston, London, Henley: Routledge & Kegan Paul, 1981), 69.

⁴⁶ M. Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History”, dalam *The Foucault Reader*, ed. P. Rabinow (Harmondsworth: Penguin, 1984), 87-90.

sebaliknya, fakta itu sendiri dibangun dari “keinginan untuk kebenaran (*will to truth*)”. Selanjutnya, genealogi Foucault menunjukkan bagaimana “subyek” dibentuk dalam wacana.⁴⁷ Foucault menggambarkan genealogi menggunakan salah satu metafora Nietzsche yang terkenal. Genealogi adalah “abu-abu”, tugasnya adalah menguraikan tulisan hieroglif tentang manusia masa lalu, masa lalu yang bukan hitam (benar-benar tidak diketahui) atau putih (yaitu transparan), tetapi sesuatu di antara (abu-abu), yaitu, ambigu dan tidak pasti. Dengan demikian, investigasi yang ketat diperlukan, sehingga makna masa lalu akan terungkap: “genealogi, akibatnya, membutuhkan kesabaran dan pengetahuan tentang detail, dan itu tergantung pada akumulasi bahan sumber yang luas.”⁴⁸

Genealogi yang digagas Foucault menganggap realitas manusia sebagai efek dari jalinan sejarah tertentu dan praktik budaya, yang ditetapkan untuk dilacak dan dijelajahi. Alih-alih melihat sejarah sebagai perkembangan berkelanjutan dari skema ideal, genealogi berorientasi pada “diskontinuitas”. Genealogi mengungkap adanya gangguan, ketidakmerataan dan proses acak yang dipertanyakan dalam evolusi linier yang seharusnya terjadi dalam sejarah. Dalam konteks ini, keberadaan kita sekarang ini tidak diteorikan sebagai hasil dari perkembangan yang berarti, tetapi lebih sebagai sebuah episode, hasil dari perjuangan dan hubungan kekuatan dan dominasi. Oleh karena itu genealogi adalah sejarah pertarungan, strategi dalam pertarungan itu, dan cara-cara yang berkelindan dengannya.⁴⁹

Foucault berpendapat bahwa dalam relasi kekuasaan, individu dan kelompok dapat menemukan ruang untuk menolak dominasi, mengupayakan kebebasan dan mengejar kepentingan. Dengan demikian ia menarik garis signifikan perbedaan antara relasi kuasa, sebagai arena permainan di mana kebebasan dapat dilakukan, dengan relasi dominasi yang perlu ditolak.⁵⁰

⁴⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality*, Vol. 1: *The Will to Knowledge*, trans. R. Hurley (London: Penguin, 1998), 79.

⁴⁸ Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History”, 76-77.

⁴⁹ Michel Foucault, *Discipline and Punish* (London, Penguin, 1991), 5-15.

⁵⁰ *Ibid.*

Genealogi Foucault tidak berhenti hanya pada fokusnya pada perang wacana (*war of discourses*) dan relasi kekuasaan (*power relations*). Dengan mengungkap “diskontinuitas” dalam pengembangan berkelanjutan sebuah sejarah, proyek genealogi Foucault juga menyiratkan diskontinuitas dalam formasi kehidupan sosial saat ini. Genealogi berusaha melangkah lebih jauh dengan menelusuri cara berpikir yang mungkin berbeda, bukan menerima dan melegitimasi apa yang sudah menjadi “kebenaran”. Tujuannya adalah untuk menyediakan memori-balik (*counter-memory*) yang akan membantu menciptakan kondisi historis dan praktis dari keberadaan saat ini.⁵¹

Genealogi menyediakan mikroanalisis fungsional dari relasi kuasa, yang beroperasi pada hal detail terkecil dan yang tidak penting. Deleuze menunjukkan bahwa dalam *The Archaeology of Knowledge*, Foucault membuat perbedaan antara formasi diskursif dan non-diskursif yang bisa diungkap dengan genealogi.⁵² Perbedaan itu bersifat inter-sosial dan terus berkembang dan beroperasi untuk menghasilkan jenis realitas baru, dengan mengungkap realitas sebelumnya.⁵³ Genealogi akhirnya diartikan sebagai seperangkat sarana untuk menggambarkan hubungan teori dan praktek.⁵⁴ Kerangka diskursif dan non-diskursif Foucault dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi Husein Muhammad serta aktivisme sosial yang dia gerakkan bersama dengan jejaring relasi kuasanya.

Tugas genealogi adalah menganalisis hubungan timbal balik antara sistem kebenaran, wacana, pengetahuan, dan sejarah, dengan mekanisme kuasa, rezim yang memproduksi dan menentukan suatu kebenaran. Dalam penelitian ini, genealogi akan digunakan untuk menganalisis wacana Husein Muhammad yang dikonstruksi sebagai

⁵¹ M. Majon, *Foucault's Nietzschean Genealogy: Truth, Power and the Subject* (Albany, New York State University Press, 1992), 122.

⁵² G. Deleuze, *Foucault* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1992), 34.

⁵³ *Ibid.*, 35.

⁵⁴ Maria Tamboukou, *Writing Genealogies: An Exploration of Foucault's Strategies for Doing Research*, (tpp: t.p., t.t.), 5.

wacana, sementara itu pada saat yang sama konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia internasional dan nasional menjadi legitimasi kebenaran wacana karena merupakan rezim HAM dunia. Genealogi dalam konteks ini bertugas menganalisa awal mula wacana Husein Muhammad dan perkembangan kebenaran, serta menganalisis akar pengetahuan, wacana, dominasi, penyingkiran, marjinalisasi, penaklukan, hubungan kekuatan dan kekuasaan. Ia berurusan dengan kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi kuasa yang dikaitkan dengan praktek diskursif, berfokus pada persoalan kuasa yang bersifat praktis. Ia meneliti tentang bagaimana keterkaitan antara kekuasaan, pengetahuan, dan objeknya. Ia digunakan untuk melacak perkembangan wacana, peneguhan wacana, dominasi, penyingkiran wacana lain, wacana digunakan untuk membela siapa, dan bagaimana relasi kuasa.⁵⁵

Genealogi dan Analisis Relasi Kekuasaan

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan penyelidikan terhadap karakteristik relasi kekuasaan (*power relations*) dalam dunia modern yang bertolak dari pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi. Konsep kekuasaan dalam genealogi, dalam pandangan Foucault tidak dimaknai sebagaimana yang ditunjukkan oleh perspektif Marxian atau pun Weberian. Ia tidak beroperasi secara negatif melalui praktik represi, koersi dan tekanan dari institusi pemegang kekuasaan. Kekuasaan tidak diartikan sebagai fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan diperoleh berkat kharisma (Weber). Ia bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan atas yang lain dalam relasi *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan secara produktif. Kekuasaan dalam pandangan Foucault bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki tetapi relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Kekuasaan tidak terpusat,

⁵⁵ Petrus Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault: Disiplin Tubuh dan Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 30.

namun mengalir dan menyebar (*omnipresent*) dengan dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan.

Praktik pendisiplinan memiliki arti sebagai bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Beroperasinya kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yaitu terhadap tubuh sosial (*population*). Gagasan Foucault ini dikenal sebagai konsep *governmentality*. Dengan begitu, tidak tepat jika memahami kekuasaan dengan mempertanyakan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu berasal, melainkan harus dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan itu beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Pada penelitian ini, praktik pendisiplinan ini akan penulis gunakan untuk memberikan analisis terhadap normalisasi konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bentuk diskursif dan non diskursif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis praktik pewacanaan yang digerakkan oleh Husein Muhammad melalui Fahmina, Komnas Perempuan, beserta dengan jejaring Islam Sipil di Indonesia, dan praktik aktivisme sosialnya untuk mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok sosial yang mengalami diskriminasi di Indonesia.

Konsep kekuasaan Foucault bukan *sovereign power* akan tetapi *disciplinary power*. Konsep ini bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan berfungsi dalam dan terhadap relasi sosial, ekonomi, keluarga dan seksualitas. Kekuasaan pada pengertian ini tidak menyoal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, namun menyangkut normalisasi kelakuan yang didisain dengan memberdayakan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. *Disciplinary power* beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai kendaraan bagi kekuasaan. Ia mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh.

Foucault menjelaskan lima proposisi mengenai kekuasaan dalam bukunya *The History of Sexuality Vo. I*, yakni:⁵⁶

- a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diperoleh, diraih, digunakan dan dibagikan sebagai sesuatu yang bisa digenggam atau bahkan dapat punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
- b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan dikuasai.
- c. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi perbedaan *binary oppositions* disebabkan oleh kekuasaan itu mencakup keduanya.
- d. Relasi kekuasaan itu bersifat non subjektif dan intensional.
- e. Dimana ada kekuasaan, disitu juga ada anti kekuasaan atau resistensi yang berasal dari dalam kekuasaan itu, bukan dari luar relasi kekuasaan.

Pandangan Foucault di atas menunjukkan bahwa kekuasaan harus difahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Ia mesti dibaca sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang menciptakan sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan.

Wacana, Kekuasaan dan Normalisasi

Pemantapan pengetahuan sehingga ia menjadi khas, melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak lepas dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan awam. Pemantapan itu berlangsung pada level wacana. Secara implisit, Foucault mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat

⁵⁶ Michel Foucault, *The History of Sexuality, Vol I.*, 94-95.

universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan *legitimate*.

Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui aparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari aparatus yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak. Distingsi antara yang benar dan yang salah juga melibatkan aparatus ilmiah yang memproduksi pengetahuan melalui ritus-ritus kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi kebenaran pengetahuan itu.

Pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks Indonesia kontemporer menunjukkan adanya praktik pewacanaan. Meskipun wacana yang dikonstruksi sudah memberikan pengaruh bagi pergeseran konstruksi kebenaran di tengah komunitas kulturalnya, pesantren, namun ia tidak disadari sebagai sebuah kekuasaan yang dioperasikan. Sehingga menjadi penting untuk mempertanyakan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam menormalisasi konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia.

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Sebagai contoh, definisi psikiatri tentang mental mengubah praktik penanganan orang gila. Definisi kedokteran tentang penyakit, menyebabkan isolasi, pengasingan, dan mengubah hubungan sosial. Konsep tentang kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan,

fitnes, pakaian, dan kursus-kursus. Agama menghasilkan penyeragaman, baik pakaian, bahasa, perilaku, juga menghasilkan diskriminasi. Pembagian kerja membuat diskriminasi terhadap seksualitas, efisiensi, dan tradisi. Rezim wacana yang bersandar pada definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik sosial. Dalam konteks pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, definisi-definisi dispositif yang dikonstruksi mengindikasikan adanya efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana, misalkan saja definisi tentang LGBT dalam perspektif teologis, kata sesat dalam konteks kelompok minoritas berkeyakinan di Indonesia, dan kesetaraan perempuan yang seluruhnya dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam pandangan Foucault, tidak ada model general hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap zaman selalu memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang menggugah Foucault mencuplik genealogi sebagai perangkat analisisnya yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisa yang digunakan oleh Foucault sebelumnya dari beberapa karya awalnya yang menggunakan analisa arkeologi, dalam *Archeology of Knowledge, Madness and Civilization* dan *The Order of Things* yang terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan, melalui *genealogy of power* ia memperluas penyelidikannya pada teknologi kekuasaan. Dengan demikian, setiap masa memiliki watak pengetahuan yang khas dan definisi kebenaran yang khas pula. Foucault menunjukkan terjadinya pergeseran-pergeseran formasi wacana itu dalam penyelidikannya tentang kegilaan, penyakit, kesejahteraan, dan seksualitas yang berimplikasi pada perubahan-perubahan hubungan sosial. Namun, melalui arkeologi, pokok perhatian Foucault bukan dalam rangka menunjukkan terjadinya pergeseran disposisi pengetahuan itu, melainkan bagaimana beroperasinya kekuasaan dalam membentuk suatu disposisi pengetahuan tertentu.

Karya awal Foucault yang mencuplik genealogi dalam analisisnya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya. Sebaliknya, perhatian utama Foucault terletak pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi tersasar pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka perhatian pokok penyelidikan genealogi tertuju pada tubuh individu, yang efek-efek teknologi kekuasaan itu dapat diketahui.

Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *sovereign power* atau *disciplinary power*, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan *disciplinary power*, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. Jika objek *disciplinary power* adalah tubuh individu, maka subjek *governmentality* adalah populasi (tubuh sosial). *Governmentality* adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate*. Dengan ini, kekuasaan yang dijalankan tidak akan melahirkan anti-kekuasaan. Praktik *governmentality* mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui *governmentality*, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model *disciplinary power* yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu.

Perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat diketahui dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk

mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (*to determine the conduct of other*) adalah buruk.

Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan.⁵⁷ Dalam konteks Husein Muhammad, aktivisme sosial yang digerakkan melalui Fahmina dan jaringannya menjadi objek pengamatan penulis dalam mengetengahkan berlangsungnya *governmentality*. Model relasi kekuasaan *governmentality* ini berada di antara *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan.

Governemntality disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan tindakan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka. *Governmentality* merupakan konsep kekuasaan yang digunakan oleh Foucault untuk mempelajari kapasitas otonom individu melakukan kontrol diri. *Governmentality* adalah konsep kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dengan demikian, ada tiga level analisa kekuasaan, yakni yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi, yang biasanya disebut sebagai kekuasaan.⁵⁸

Conduct of conduct bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan

⁵⁷ Baca, Michel Foucault, *Technology of the Self*. In *The Essential Foucault* (New York: The New Press, 1982).

⁵⁸ Michel Foucault, *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault* (New York: The New Press, 1982), 138-141.

tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh Negara.⁵⁹

Tabel 1.

Aplikasi Operasional Analisis Genealogi terhadap Wacana
Perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad

Unsur Genealogi	Konsep Teoritis	Aplikasi Operasional
Model Relasi	Relasi kekuasaan, bukan relasi dominasi. Relasi kuasa yang setara	Model relasi kekuasaan digunakan untuk menganalisis relasi kuasa yang beroperasi dalam produsen wacana, proses produksi dan produk wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad
Aktor	Antar subjek, atau antar individu, bukan relasi antara negara-rakyat, dominan-marjinal, penguasa-dikuasai.	<i>Govermantility, conduct of</i>
Aparatus	<i>Governmentality</i> , bukan dominasi dan hegemoni.	<i>conduct</i> , dan <i>freedom</i> sebagai basis relasi kuasa, digunakan untuk
Teknologi	<i>Conduct of conduct</i> , bukan kekerasan dan manipulasi ideology	menganalisis teknik dan mekanisme normalisasi konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad.
Basis Relasi	Kebebasan (<i>freedom</i>), bukan dominasi	Objeknya dalam penelitian ini adalah wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad, dan aktivisme sosial dalam mengadvokasi hak-hak kelompok sosial yang

⁵⁹ *Ibid.*

		mengalami diskriminasi, yang dia gerakkan melalui Fahmina dan jaringan Islam Sipil di Indonesia.
--	--	--

2. Hermeneutika Al-Qur'an

Keharusan untuk menghadirkan hermeneutika Al-Qur'an disini, bukan dalam rangka untuk menjadi dasar teoritis dalam menafsirkan pemikiran Husein Muhammad, karena pemikiran Husein Muhammad merupakan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sehingga tidak relevan dan tidak menarik jika diuraikan pada penelitian ini suatu penafsiran atas penafsiran.

Penyertaan hermeneutika Al-Qur'an pada penelitian ini, sesungguhnya didasari oleh realitas bahwa wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang diproduksi oleh Husein Muhammad diproduksi melalui praktik pembacaan Al-Qur'an. Praktik penafsiran ini tidak bisa dia hindarkan karena salah satu faktor yang melatarbelakangi polemik wacana perlindungan hak-hak kelompok sosial masyarakat yang mengalami diskriminasi adalah persoalan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an. Sehingga hermeneutika yang akan digunakan sebagai kerangka teori disini adalah kategorisasi praktik penafsiran yang diuraikan oleh para sarjana tafsir Al-Qur'an. Praktik hermeneutis yang akan diungkapkan dibawah ini, sebagai sebuah kerangka teori akan digunakan untuk menganalisis praktik penafsiran yang dijalankan oleh Husein Muhammad dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hermeneutika sebagai sebuah istilah sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuin* yang berarti menafsirkan.⁶⁰ Menurut Bertens, hermeneutika adalah sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang *mufassir* dalam memahami teks keagamaan.⁶¹ Dalam pengertian yang lebih luas, Breiten

⁶⁰ Richard E. Palmer, *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1967), 12.

⁶¹ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, I, (Jakarta: Gramedia, 1981), 225.

mendefinisikan hermeneutika sebagai ilmu yang merefleksikan tentang sesuatu kata atau *event* yang ada pada masa lalu untuk dapat dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna dalam konteks kekinian.⁶² Sedangkan menurut Robinson, hermeneutika berusaha mengkaji persoalan wacana (*speech*) dan penjelasan tentang sesuatu yang belum jelas dengan menggunakan ekspresi bahasa serta penerjemahan (*translation*) dari suatu bahasa ke bahasa lain yang lebih jelas.⁶³

Dalam pandangan Fazlur Rahman, sebagai sebuah metodologi penafsiran, hermeneutika secara umum terdiri atas dua bentuk atau model, yaitu; *Pertama*, hermeneutika objektif yang dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher 1768-1834, Wilhelm Dilthey 1833-1911 dan Emilio Betti 1890-1968.⁶⁴ Menurut model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher, adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan diturunkan dan bersifat instruktif.⁶⁵ Penafsir harus keluar dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam tradisi dimana si penulis teks tersebut hidup, atau paling tidak membayangkan seolah dirinya hadir pada zaman itu. Sedemikian, sehingga dengan masuk pada tradisi pengarang, memahami dan menghayati budaya yang melingkupinya, penafsir akan mendapatkan makna yang objektif sebagaimana yang dimaksudkan si pengarang.⁶⁶

⁶² "Hermeneutica is the science of reflecting on how a word or an event in a past time and culture may understand and become existentially meaningful in our present situation." Lihat Card Breiten, *History of Hermeneutics*, (Philadelphia: Form Press, 1966), 131.

⁶³ James M. Robinson, "Hermeneutics Since Barth" dalam J.M. Robinson dan Jhon B. Cobb, *The New Hermeneutics*, (New York; Harper and Row, 1964), 2-6.

⁶⁴ Fazlur Rahman memasukkan juga Emilio Betti dalam tradisi hermeneutika objektif ini. Lihat Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung; Pustaka, 1985), 9-10.

⁶⁵ Nashr Hamid Abu Zaid, *Isykalīyat al-Ta'wil wa Aliyat al-Qira'ah*, (Kairo: al-Markaz al-Tsaqafi, t.t.), 31.

⁶⁶ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, 230.

Kedua, hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer 1900-2002 dan Jacques Derida l. 1930.⁶⁷ Menurut model kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.⁶⁸ Penekanannya adalah isi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal si penulis. Inilah perbedaan mendasar antara hermeneutika objektif dan subjektif. Dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun, sebab begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah menjadi berdiri sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Seseorang harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki saat ini (*vorhabe*), apa yang dilihat (*vorsicht*) dan apa yang akan diperoleh kemudian (*vorgriff*).⁶⁹ Dalam konteks keagamaan, teori hermeneutika subjektif ini berarti akan merekomendasikan bahwa teks-teks al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan kekinian, lepas dari bagaimana realitas historis dan *asbal al-nuzul-nya* dimasa lalu.

Raotraud Wielandt, berbeda dengan tipologi yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman di atas, ia menguraikan tipologi hermeneutika dalam konteks pembacaan Al-Qur'an pada masa kontemporer ke dalam enam kelompok; (1) pembacaan yang didasarkan pada rasionalisme pencerahan, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, (2) pembacaan yang didasarkan pada sains modern dan kontemporer, seperti pembacaan yang dipraktikkan oleh Thantawi Jauhari, (3) pembacaan yang berangkat dari ilmu sastra, seperti yang diijtihadkan oleh Amin Al-Khulli, Ahmad Muhammad Khalafullah, dan Bintu Syathi', (4) pembacaan dengan perspektif historisitas teks, seperti pembacaan oleh Fazlur

⁶⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, 9-10.

⁶⁸ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, 225.

⁶⁹ *Ibid*, 232.

Rahman dan Nashr Hamid Abu Zayd, (5) pembacaan yang bernuansa kembali ke pemahaman generasi awal Islam, seperti Sayyid Quthb dan Abu al-‘Ala al-Maududi dan (6) pembacaan secara tematik Hassan Hanafi.⁷⁰

Sementara itu, Sahiron Syamsuddin menyederhanakan tipologi Wielandt di atas hanya menjadi tiga macam, yaitu (1) quasi objektivis konservatif, (2) subjektivis, yang dilakukan oleh Hassan Hanafi dan Muhammad Syahrur, dan (3) quasi objektivis progresif, yang diamalkan oleh Fazlur Rahman, Muhammad al-Thalibi dan Nashr Hamid Abu Zayd.⁷¹

Berbeda dengan yang sebelumnya, Abdullah Saeed dalam karyanya *Interpreting the Qur’an* memetakan model pembacaan Al-Qur’an kontemporer –dalam arti model pendekatan dalam pemahaman dan sikap para pembacanya– ke dalam tiga macam, yaitu tekstualis (para kaum tradisionalis dan salafi), semi-tekstualis (para neo revivalis seperti Ikhwanul Muslimin dan Jama’at Islami), dan kontekstualis (Fazlur Rahman, Ijtihadi, Muslim Progresif dan Muslim Liberal).⁷²

Adapun pembagian tipologi pembacaan Al-Qur’an yang dirumuskan oleh Farid Esack, mengelompokkan pembaca Al-Qur’an yang dilakukan oleh berbagai pihak⁷³ ke dalam dua kategori; kategori pembaca internal (orang Islam) dan kategori pembaca eksternal (non-Muslim). Kategori pertama memiliki tiga macam model pembacaan; pertama model pembacaan yang dipraktikkan Muslim awam, kedua ulama’ konvensional, dan ketiga pembacaan Al-Qur’annya ulama’

⁷⁰ Rotraud Wielandt, “Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary,” dalam *Encyclopedia of the Qur’an* (Leiden: Brill, 2002), 124–142.

⁷¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an* (Edisi Revisi Dan Perluasan) (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), 54–58.

⁷² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 3.

⁷³ Konsep hermeneutika Farid Esack secara komprehensif dituangkan dalam karyanya yang fenomenal yaitu Farid Esack, *Qur’an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oneworld, 1997). Pada bab pertama dalam buku tersebut Esack menguraikan apa itu hermeneutika, istilah kunci yang perlu diketahui dalam proses penafsiran seperti *Tauhid*, *Mustad’afin*, *Al-Qisth*, dan lain-lain, dan bahkan mengenai diskursus “the other”.

kritis. Sementara itu, kategori pembaca eksternal⁷⁴ memiliki tiga model yang terdiri dari model pembacaan yang dilakukan oleh pengamat partisan,⁷⁵ revisionis (pengamat yang tidak berkepentingan),⁷⁶ dan pecinta polemik.⁷⁷ Fokus penelitian ini adalah pengkajian atas model pembacaan Al-Qur'an yang menautkan isu HAM dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipraktikkan oleh garis pembaca internal, yaitu seorang muslim –dalam penelitian ini– yang menyandang identitas ulama' kenamaan Indonesia; Husein Muhammad.

Kategori pembaca internal yang pertama, yaitu mereka yang termasuk dalam definisi masyarakat Muslim awam. Praktik pembacaan yang berbeda mereka nilai sebagai bentuk penyimpangan⁷⁸ Adapun kategori model pembacaan internal yang kedua, yaitu pembacaan yang dilakukan oleh ulama' konvensional. Mereka ini disebut Esack sebagai kelompok ulama' yang fanatik dan apologetik. Dalam pandangan Esack, figur yang termasuk kelompok ini adalah seperti Abū al-A'lā al-Maudūdi dan Binti Syāthi'.⁷⁹ Sedangkan model pembacaan ketiga dalam kategori pembacaan internal, yaitu dilakukan oleh ulama' kritis. Mereka ini adalah para ulama' yang melakukan praktik pembacaan atas Al-Qur'an secara kritis. Mereka yang tergolong dalam jajaran ulama' kritis ini disebutkan oleh Esac seperti Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, dan Nashr Hamid Abu Zayd.⁸⁰

Kelompok pembaca ketiga ini memposisikan Al-Qur'an tidak lebih seperti teks-teks yang lain. Sebagai teks biasa, pembacaan yang dilangsungkan kepadanya harus mempertimbangkan fakta empiris dan historisitas kultural yang mungkin memiliki pengaruh

⁷⁴ Farid Esack, *The Qur'an: A Beginner's Guide* (Oneworld Publications, 2009), 10.

⁷⁵ *Ibid.*, 6–7.

⁷⁶ *Ibid.*, 8–9.

⁷⁷ *Ibid.*, 9–10.

⁷⁸ *Ibid.*, 2.

⁷⁹ *Ibid.*, 3–4.

⁸⁰ *Ibid.*, 5–6.

signifikan.⁸¹ Karena sebagai sebuah teks yang berbahasa Arab yang diturunkan di tengah masyarakat Arab, budaya Arab harus dinilai sebagai budaya yang ikut menentukan makna teks yang dikandungnya. Konteks inilah yang menjadi argumentasi mereka menyoal perlunya kritisisme ketika hendak membaca Al-Qur'an dan membawanya kedalam konteks aksiologis yang berada di wilayah dan budaya yang berbeda dengan Arab. Sependapat dengan Abu Zayd, Esack menggambarkan pandangan umum kelompok ini bahwa tidak semestinya Al-Qur'an dibaca sekedar sebagai teks hukum, teks etika, dan teks mistisisme, lebih-lebih dijadikan sebagai teks yang intimidatif terhadap golongan-golongan tertentu.⁸²

Selain kategori-kategori di atas, terdapat satu lagi varian hermeneutika Al-Qur'an, yaitu hermeneutika pembebasan dengan paradigma kritis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim kontemporer khususnya Hasan Hanafi dan Farid Esack.⁸³ Hermeneutika Farid Esack sebagaimana telah dijelaskan pada paragraph di atas. Adapun perspektif hermeneutika Hasan Hanafi mendudukan hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman tetapi lebih dari itu adalah aksi. Dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada realitas kehidupan manusia. Hermeneutika sebagai sebuah proses pemahaman hanya menduduki tahap kedua dari keseluruhan proses hermeneutika.⁸⁴ Hassan Hanafi berpandangan bahwa hermeneutika adalah ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran manusia dengan objeknya, dalam hal ini teks Al-Qur'an. Prosesnya, *pertama*, seseorang harus memiliki "kesadaran historis" yang menentukan

⁸¹ Nashr Hamid Abu Zayd, *Mafhūm al-Nās, Dirāsah fī Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kutub, 1993), 27.

⁸² Farid Esack, *Samudera Al-Qur'an*, terj. Nuril Hidayah (Diva Press, 2007), 19.

⁸³ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 163.

⁸⁴ Hasan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi* terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), 1-25.

keaslian teks dan tingkat kepastiannya; *kedua*, memiliki “kesadaran eidetik”, yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional; *ketiga*, “kesadaran praxis” yang menggunakan makna-makna tersebut sebagai sumber teoritis bagi tindakan yang mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia. Dasar dari penjelasan pada bagian ini adalah pandangan Hassan Hanafi bahwa kebenaran teoritis tidak bisa diperoleh dengan argumentasi tertentu melainkan dari kemampuannya untuk menjadi sebuah motivasi bagi tindakan.⁸⁵

Dengan demikian, terdapat beragam model hermeneutika dengan istilah-istilah yang dikemukakan berdasarkan pendekatan dalam melakukan kategorisasi, mulai dari hermeneutika objektif, hermeneutika subjektif, hingga hermeneutika kritis. Model-model ini yang akan digunakan untuk menganalisis praktik penafsiran Husein Muhammad dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif⁸⁶ dengan sumber-sumber data dari bahan pustaka, sehingga bisa juga dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan.⁸⁷ Pengertian kualitatif ini dimaksudkan untuk mengolah data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis maupun ucapan dan tindakan yang diamati.⁸⁸ Oleh karenanya, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah ucapan tertulis seperti dokumen melalui catatan tertulis, rekaman audio, video, dan foto, dan juga tindakan.⁸⁹ Kriteria data yang dikumpulkan bersifat pasti, yakni segala informasi tentang yang terjadi sebagaimana adanya, tidak sekedar data yang bisa diamati baik dalam bentuk ucapan

⁸⁵ Hasan Hanafi, *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, terj. Jajat Firdaus, (Yogyakarta; Prisma, 2003), 109.

⁸⁶ L.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, t.th), 4-5.

⁸⁷ M. Rusli, "Metode Penulisan" dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk.), *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 153.

⁸⁸ Pandangan Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh L.J.Moleong. *Ibid.*, 4.

⁸⁹ *Ibid.*, 157.

maupun tindakan tetapi data yang memiliki kandungan makna dibalik yang tampak dan terucap tersebut.⁹⁰

1. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu; data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui telaah kepustakaan (*library research*) dan wawancara mendalam (*depth interview*).⁹¹ Telaah kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan semua tulisan Husein Muhammad, baik dalam bentuk buku maupun artikel, baik yang diterbitkan secara cetak maupun yang diterbitkan secara online, dan baik yang diterbitkan sendiri atau pun oleh lembaga jejaring kerja kemanusiaannya,⁹² mulai dari tahun 1999 hingga 2019. Selanjutnya data tersebut dipilih berdasarkan tema dalam pemikiran Husein Muhammad yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu wacana tafsir keagamaan Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer, dan secara kategoris sesuai dengan materi sebagaimana objek isu HAM pada penelitian ini, yaitu kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual (LGBT), kelompok minoritas keagamaan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup), dan kelompok sosial subordinat (Perempuan).

Adapun teknik kedua, yaitu wawancara. Wawancara secara mendalam dilakukan secara langsung dengan Husein Muhammad, sehingga diperoleh informasi dan keterangan guna mengungkap konteks pemikirannya. Selain itu, wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan dengan informan yang peneliti tentukan berdasarkan pertimbangan sejauh mana relevansi yang dimilikinya dengan pemikiran dan aktivisme Husein Muhammad. Sebagai contoh pengurus Fahmina Institute dan jejaringnya dalam gerakan Islam Sipil di Indonesia.

Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan didapatkan dengan mensurvei dokumen catatan peristiwa

⁹⁰ *Ibid.*, 2.

⁹¹ Tujuan wawancara dijelaskan oleh Lincoln dan Guba. *Ibid.*, 137.

⁹² Fahmina, Balqis, Rahima, Puan Amal Hayati, Wahid Institute, KPPI, Desantara, ICIP, ISIF, PKBI.

yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh berbagai pihak dalam berbagai bentuk sumber yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya seperti buku, jurnal, buletin, laporan dan lain sebagainya. Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang menunjang data primer. Setelah terkumpul, data-data sekunder dimaksud direkonstruksi dan dibaca secara kritis sesuai dengan kerangka penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah terhimpun dari berbagai sumber selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori domain yang dibuat sesuai dengan kerangka penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis⁹³ dengan tujuan agar diperoleh kecenderungan umum untuk memberikan gambaran tentang dinamika produksi wacana, konstruksi wacana, teknik normalisasi wacana dan relasi kuasa dalam pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan taksonomi (*taxonomy*).

Taksonomi, sebagai sebuah pendekatan analisis dilakukan pada himpunan kategori yang diorganisasi sesuai dengan *semantic relationship* atau terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan,⁹⁴ akan membantu peneliti dalam memahami dan memetakan domain-domain tertentu dalam fokus penelitian ini yang memiliki derajat kompleksitas, karena tersebar dan variatifnya data yang memuat wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad. Masing-masing domain diuraikan secara mendalam, kemudian membaginya lagi ke dalam sub domain yang lebih khusus. Pendekatan analisis taksonomi ini memberikan gambaran tentang domain dan sub domain dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad.

⁹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 63.

⁹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 349.

Tabel 2. Taksonomi Wacana Perlindungan Hak Asasi Manusia
Husein Muhammad

Domain Utama Wacana Perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad (1999 – 2019) “Islam dan Hak Asasi Manusia”			
Sub Domain 1 Wacana Perlindungan Hak-Hak Asasi Kelompok Berorientasi Seksual Diluar <i>Mainstream</i>	Sub Domain 2 Wacana Perlindungan Hak- Hak Asasi Kelompok Minoritas Beragama/Berkeyakinan dalam Bingkai Pluralisme Agama		Sub Domain 3 Wacana Perlindungan Hak-Hak Asasi Perempuan
Wacana tentang perlindungan hak-hak LGBT	Wacana tentang perlindungan hak-hak minoritas beragama dalam isu Ahmadiyah	Wacana tentang perlindungan hak-hak minoritas beragama dalam isu Hidup Dibalik Hidup	Wacana tentang perlindungan hak-hak asasi perempuan dalam isu kekerasan terhadap perempuan

H. Sistematika Pembahasan

Konstruksi penyusunan penelitian ini, dilakukan oleh penulis dengan membagi bagian penelitian ini kedalam tujuh bab. Hal ini dimaksudkan supaya ada pemahaman mengenai hasil penelitian ini secara komprehensif, sistematis dan koheren. Adapun penjelasan mengenai ketujuh bab yang penulis maksudkan adalah sebagaimana berikut:

Bab pertama, berisi mengenai kerangka umum yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga keberadaannya menjadi pijakan untuk melakukan pengembangan secara lebih mendetail

mengenai penelitian ini pada bagian bab-bab setelahnya. Secara sistematis bagian ini menguraikan tentang latar belakang penelitian ini, rumusan masalah guna menutup kemungkinan tidak fokusnya penelitian ini, tujuan dan manfaat yang berisi maksud kontributif penelitian ini secara akademis dan praksis, kajian pustaka sebagai bahan untuk mendeterminasikan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori yang berisi mengenai teori yang digunakan guna menganalisis objek penelitian, metode penelitian sebagai piranti operasional yang akan penulis gunakan untuk melakukan langkah-langkah metodik-taktis dalam menjalankan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjadikan hasil penelitian ini mudah difahami secara sistematis.

Bab dua, menampilkan gambaran umum kontestasi wacana Hak Asasi Manusia di tengah demokratisasi umat Islam Indonesia. Pada bagian ini, penulis menguraikan dinamika umat Islam Indonesia kontemporer dalam menyikapi isu HAM yang terkategori dalam tiga kelompok yaitu Islam Arus Utama (Tradisionalis dan Modernis), Islamis dan Islam Sipil. Uraian pada bagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan konteks pertarungan wacana (*war of discourses*) yang berkelindan dengan wacana perlindungan Hak Asasi Manusia dalam pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad.

Bab tiga, berisi dinamika intelektual Husein Muhammad sebagai produsen wacana perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer. Bagian ini memuat lima bagian pembahasan, yaitu: biografi intelektual Husein Muhammad, Islam Tradisional sebagai arena distribusi wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad, resistensi Islamisme terhadap pandangan Husein Muhammad, Husein Muhammad sebagai aktivis di tengah gerakan Islam Sipil di Indonesia, dan produk-produk wacana Husein Muhammad.

Bab empat, memuat konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wacana tafsir agama Husein Muhammad, yaitu wacana hubungan Islam dengan HAM, wacana perlindungan HAM perspektif Islam, wacana perlindungan hak kelompok sosial dengan orientasi seksual diluar mainstream (LGBT), perlindungan hak minoritas kelompok beragama/berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup

Dibalik Hidup), dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan. Bagian ini, selain dimaksudkan untuk mengungkap konstruksi Hak Asasi Manusia yang diupayakan oleh Husein Muhammad, juga untuk memberikan analisis tentang hubungan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad dengan konstruksi Hak Asasi Manusia internasional.

Bab lima, menguraikan dua analisis, yaitu analisis praktik pembacaan Al-Qur'an dalam wacana keagamaan Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer, dan analisis relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya. Relasi kuasa yang dianalisis pada bagian ini meliputi relasi kuasa dalam *persona* Husein Muhammad sebagai produsen wacana dan relasi kuasa dalam proses produksi wacana. Analisis relasi kuasa ini juga memuat normalisasinya. Bagian ini juga berisi refleksi peneliti terhadap gerakan intelektualisme Islam kontemporer melalui praksis Husein Muhammad.

Bab enam, bagian ini adalah penghujung dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian dan analisis dalam keseluruhan bagian disertasi ini, peneliti menyimpulkan temuan penelitian ini kedalam empat poin pokok sebagaimana berikut:

Pertama, wacana-wacana Husein Muhammad yang dikonstruksi guna merespon isu hak-hak asasi kelompok sosial masyarakat di Indonesia kontemporer yang mengalami diskriminasi, yaitu LGBT, Ahmadiyah, Hidup Dibalik Hidup (HDH), dan perempuan, merupakan bentuk reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin agama yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan teks khazanah Islam Tradisional. Bentuk reinterpretasi Husein Muhammad ini didasarkan pada gagasannya tentang prinsip-prinsip penafsiran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*mabādi' al-tafsir bi al-qiyām al-insāniyyah*). Praktik reinterpretasi ini dilangsungkan dalam tiga kerangka; *pertama*, kategorisasi, yaitu penafsiran dengan mengkategorisasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam dua kategori utama, yaitu ayat-ayat universal dan ayat-ayat partikular. Ayat-ayat universal merupakan prinsip-prinsip dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu: kebebasan (*al-hurriyyah*), kesetaraan (*al-musāwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), keadilan (*al-'adalah*), dan penghormatan kepada manusia (*karāmah al-insān*). Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah ayat-ayat partikular tidak boleh keluar dari kehendak makna ayat-ayat universal. *Kedua*, pendekatan *maqāshidi*, yaitu penafsiran yang tidak sekedar menggali makna, namun juga menemukan tujuan dari makna yang dikandung oleh teks atau "*maqāshid*", dan kemudian mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal. *Ketiga*, pembacaan kritis-advokatif, yaitu penafsiran yang pada satu sisi ditujukan untuk memberikan kritik terhadap wacana tafsir agama yang dinilai telah melegitimasi berbagai tindakan diskriminasi, dan di sisi lain untuk memberikan kritik terhadap realitas sosial keagamaan yang

diskriminatif, sekaligus dimaksudkan untuk mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok sosial tertentu yang mengalami diskriminasi. Advokasi-advokasi yang dilangsungkan dalam pembacaan ini tidak hanya dalam bentuk wacana, namun telah mewujudkan juga melalui aktivisme sosial sebagai kritik praksis.

Kedua, relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi dalam tafsir agama Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer bergerak secara produktif, baik dalam konteks produsen wacana, maupun dalam proses produksi dan konstruksi wacana. Sebagai produsen wacana tafsir agama tentang perlindungan Hak Asas Manusia di Indonesia kontemporer, Husein Muhammad tidak sekedar berupaya mengungkap makna teks-teks terkait secara kategoris dan *maqāshidi*, maupun melakukan kritik sosial keagamaan yang dinilai diskriminatif bagi kelompok-kelompok tertentu secara kritis-advokatif, namun ia juga mengupayakan agar pandangan dan kehidupan sosial keagamaan kontemporer di Indonesia sejalan dengan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh relasi kuasa-pengetahuannya, yaitu Komnas Perempuan, PKBI, dan jaringan Islam Sipil di Indonesia. Relasi kuasa pengetahuan ini beroperasi secara struktural dan kultural dalam produsen wacana. Secara struktural, relasi kuasa ini mengalir melalui posisi yang diduduki oleh Husein Muhammad di dalam struktur relasi kuasanya. Sedangkan secara kultural, relasi kuasa bergerak melalui berbagai proses kultural di berbagai medium perjumpaan intelektual.

Ketiga, secara produktif, relasi kuasa beroperasi dalam proses produksi wacana Husein Muhammad melalui kolaborasi argumentasi, legitimasi dan otorisasi. Relasi kuasa beroperasi dalam menyediakan argumentasi perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijadikan acuan secara universal dan nasional, sementara kuasa pengetahuan mengupayakan argumentasi yang menopang upaya kontekstualisasi gagasan universal itu melalui reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin dalam teks Al-Qur'an dan teks khazanah Islam Tradisional. Konstruksi wacana perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad, selain memberikan legitimasi teologis terhadap berbagai aktivisme sosial yang digerakkan di Fahmina Institute, beserta jejaring kerjanya di kalangan Islam Sipil, juga melegitimasi

upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh relasi kuasanya di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Identitas Husein Muhammad sebagai figur otoritatif dari kalangan Islam Tradisional menjadi modal sosial dan kultural bagi setiap upaya membangun relasi dengan kuasa-pengetahuan. Bentuk relasi kuasa yang dibangun ini beroperasi secara kolaboratif melalui kontrol terhadap hubungan kekuasaan dengan kebenaran pengetahuan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kelompok masyarakat Indonesia kontemporer yang mengalami diskriminasi.

Keempat, wacana perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer yang diproduksi oleh Husein Muhammad, meskipun terlihat mengadopsi Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh narasi global, namun ia berupaya mengembangkannya secara adaptif dengan teks Al-Qur'an dan khazanah Islam tradisional melalui kerangka reinterpretasi terhadap keduanya. Dengan teknik dan mekanismenya, konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia yang diupayakan oleh Husein Muhammad melalui publikasi dan desiminasi setiap hasil dari reinterpretasinya terhadap doktrin-doktrin dalam teks Al-Qur'an dan teks khazanah Islam Tradisional yang berkorelasi secara langsung dengan faktor teologis yang dinilai melatarbelakangi fenomena diskriminasi terhadap hak-hak asasi LGBT, Ahmadiyah, Hidup Dibalik Hidup (HDH), dan perempuan, memperoleh respon afirmatif dari kalangan Islam Tradisional di Indonesia. Meskipun wacana perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad lahir sebagai manifestasi dari produk intelektual Islam tradisional, namun karena diproses melalui dan dalam *framework* gerakan Islam Sipil, maka sesungguhnya wacana tafsir agamanya itu merupakan praktik afirmatif terhadap rezim Hak Asasi Manusia internasional. Karena para intelektual dan aktivis Islam Sipil sesungguhnya tidak bisa mensterilkan diri dari agenda besar demokratisasi dan HAM yang bersifat global, termasuk Husein Muhammad dan Fahmina Intitute.

B. Rekomendasi

Dinamisasi Studi Qur'an harus terus dilakukan. Salah satu cara untuk menjalankannya adalah dengan menautkan studi "kitab suci" ini

dengan perspektif studi di luar dirinya. Dalam bahasa ilmiah populer di dunia PTKI saat ini dikenal dengan kajian interdisipliner, atau integrasi-interkoneksi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan -misalnya saja- menginterkoneksi *variable* tertentu dalam studi Qur'an dengan *variable* yang lain dalam disiplin yang berbeda. Seperti penelitian ini yang membaca bagaimana hubungan Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia dalam wacana dan aktualisasinya -dalam bentuk aktivisme sosial- yang diproduksi dan digerakkan oleh seorang pembaca Al-Qur'an, yaitu Husein Muhammad, di tengah arus demokrasi Indonesia, yang diteropong dengan analisis genealogi Michel Foucault dan Hermeneutika.

Sedangkan terkait pengembangan penelitian ini, masih dimungkinkan adanya peluang untuk mengembangkan penelitian ini menjadi lebih luas dan mencakup isu besar yang diketengahkan; Al-Qur'an dan perlindungan HAM Pasca Orde Baru. Ini bisa dilakukan dengan melihat pola-pola diskursus dan gerakan tokoh-tokoh atau pun lembaga-lembaga Islam Sipil secara komparatif antara satu dengan lainnya dalam menyoal isu-isu sosial keagamaan yang menautkan Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia, juga bisa dilakukan pada subjek yang berbeda, yaitu tokoh-tokoh atau pun lembaga-lembaga dari kalangan Islamisme. Bahkan kajian juga bisa dilakukan dengan memotret kontestasi yang dilakukan oleh Islam Sipil dan Islamisme dalam menengahkan diskursus Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia di tengah demokratisasi umat Islam Indonesia.

Model praktik penafsiran Husein Muhammad, lebih lanjut, sangat tepat bila dikembangkan untuk mendinamiskan ayat-ayat sosial politik sebagaimana yang diajarkan dalam mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik pada Program Pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atau pun Studi Qur'an Hadits. Penafsiran yang mengharuskan pendekatan integrasi ilmu Al-Qur'an dan sosial ini bila dijadikan acuan model dalam pembelajaran mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik akan memberikan pilihan paradigma lain dalam mempelajari penafsiran ayat-ayat sosial politik dalam Al-Qur'an yang selama ini cenderung terasa sulit melampaui batas yang menghalangi teks menuju praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdalla, Ulil Abshar, dkk. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: JIL, 2002.
- Abdillah, Masykuri. *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Adib Ach, M. Khalidul, dkk. *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*. Semarang: Elsa, 2005.
- Afifah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- A'la, Abd. *Neo-Modernisme Islam*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Al-Jabiri, Mohammad Abed. *al-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan*, Cet. Ke-2. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1997.
- Al-Makassary, Ridwan dan Ahmad Gaus. *Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Anwar, Etin. *A Genealogy of Islamic Feminism, Pattern and Change in Indonesia*. New York: Reoutledge, 2018.
- Anwar, M. Syafi’i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arifin, Syamsul. *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion Or Belief in Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Ariyanto, dan Rido Triawan. *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBTI*. Edisi Petama. Jakarta: Arus Pelangi & Yayasan Tifa, 2008.
- Asshiddiqie, Jimliy. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.

- Baut, Paul S. dan Benny Harman K. *Kompilasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX*, I. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Benedanto, Pax dan M. Mahendra. *Konvensi Anti Penyiksaan*. Jakarta: Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan. "Penjelasan tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah." dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. MUI Pusat, 2009.
- Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. Routledge, 2017.
- Bourdieu, Pierre. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Columbia University Press, 1993.
- Breaten, Card. *History of Hermeneutic*. Philadelphia: Form Press, 1966.
- Bruinessen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacan Baru*. LKiS, 1999.
- _____, (ed.). *Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative Turn*. Singapore: ISEAS, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Burber, Ian. *Juru Bicara Tuhan: Antara Sains Dan Agama*. Translated by E.R. Muhammad. Bandung: Mizan, 2003.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Wajah baru Islam di Indonesia*. UII Press, 2004.
- Condé, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln N.E.: University of Nebraska Press, 1999.
- Cruzman, Charles. *Islam Liberal*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Grafiti, 1994.
- Deleuze, G. *Foucault*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1992.
- Dhakiri, M. Hanif. *Post-Tradisonalisme Islam*. Jakarta: Pustaka Isisindo, 2000.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dumitrașcu, Veronica. *Social Activism: Theories and Methods*. Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy, t.t.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oneworld, 1997.
- Esack, Farid. *Samudera Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Nuril Hidayah. Diva Press, 2007.
- Esack, Farid. *The Qur'an: A Beginner's Guide*. Oneworld Publications, 2009.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge, 2013.
- Fakih, Mansoer, dkk.,. *Merubah Kebijakan Publik*. Jakarta: Readbook, 2000.
- Feillard, Andree. *NU vis a vis Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feillard, Andree dan Remy Madinier. *The End of Innocent? Indonesia Islam and The Temptations of Radicalism*. Hawai: University of Hawai Press, 2011.
- Foucault, Michel. *Technology of the Self*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press, 1982.
- . "Nietzsche, Genealogy, History", dalam *The Foucault Reader*, ed. P. Rabinow Harmondsworth: Penguin, 1984.
- . "The Order of Discourse", dalam *Untying the Text: A Post-Structuralist Reader*, ed. R.Young. Boston, London, Henley: Routledge & Kegan Paul, 1981.
- . "Truth and Power", dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1971-1977*, ed. C. Gordon, trans. C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, K. Soper. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1980.

- . *Discipline and Punish*. London, Penguin, 1991.
- . *The History of Sexuality*, Vol. 1: *The Will to Knowledge*, trans. R. Hurley. London: Penguin, 1998.
- . *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press, 1982.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. oleh Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Gross, Marz L. *A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia*. Washington: NDIC Press, 2007.
- Haji, Muhammad. *The Shi'a Muslims of Indonesia*. Jakarta: ICAS, 2010.
- Haq, Fajar Reza UI dan Endang Tirtana. *Islam, HAM Dan Keindonesiaan*. Jakarta: Ma'arif Institute, 2007.
- Hanafi, Hasan. *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.
- . *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, terj. Jajat Firdaus. Yogyakarta; Prisma, 2003.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. *Michel Foucault: Disiplin Tubuh dan Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Leiden: Utrecht University, 2005.
- Hasyim, Syafiq. *The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom*. Bangkok Thailand: IRASEC, 2011.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton: University Press, 2000.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hikam, Muhammad A. S. *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga, 2000.

- Hilmy, Masdar. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Hilmy, Masdar. *Islamisme and Democracy in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ida, Laode. *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*. Erlangga, 2004.
- Ikhwan. *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam; Seri Disertasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Indonesia, Ahlul Bait. *Buku Putih Madzhab Syi'ah*. Jakarta: DPP ABI, 2012.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Cetakan ke-17. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Jones, Sidney. *Background Report*. Jakarta: ICG, 2002.
- Jurdi, Sarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*. Kreasi Wacana, 2007.
- Kartika, Sandra (ed) dan Id Rosdaliana. *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999.
- Kartika, Sandra dan Sapto Yunus. *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Panduan bagi Jurnalist*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Lopulalan, Dicky dan Benjamin Tukan. *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2001.
- Lubis, Todung Mulya. *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Ma'arif, Syafii. *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Islam dan Politik*. Jakarta: Cidesindo dan Dinamika, 2000.

- Majon, M. *Foucault's Nietzschean Genealogy: Truth, Power and the Subject*. Albany, New York State University Press, 1992.
- Masdar, Umaruddin. *Agama Kolonial: Kolonial Mindset dalam Pemikiran Islam Liberal*. Yogyakarta: Klik.r., 2003.
- Masruri, Siswanto. *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia: Sebuah Pengantar Elisitas*. Yogyakarta: Program Doktor Paskasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Kependidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mitsuo, Nakamura, Sharon Siddique, and Omar Farouk Bajunid, eds. *Islam & Civil Society in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, t.th).
- Monib, Mohammad, and Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mubarak, Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Muhammad, Husein. *Toleransi Islam; Hidup Damai dalam Masyarakat Plural*. Cirebon: Fahmina, 2015.
- . *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011.
- . *Ijtihad Husein Muhammad; Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- . *Toleransi Islam; Hidup Damai Dalam Masyarakat Plural*. Cirebon: Fahmina Institute, 2015.
- . *Kidung Cinta Dan Kearifan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2014.
- . *Menyusuri Jalan Cahaya*. Bentang Bunyan, 2016.

- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (ed.). *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Nuruzzaman, M. *Husein Muhammad Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2011.
- . *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Teladan Nabi*. Cirebon: Fahmina Institute, n.d.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2014.
- . *Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama di Ruang Publik*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Qomar, Mujammil. *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Jakarta: Mizan, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ridwan, Nur Khalik. *NU dan neoliberalisme: tantangan dan harapan menjelang satu abad*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2008.

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. diterjemahkan oleh Alimandan. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2004.
- Robinson, James M. "Hermeneutics Since Barth" dalam J.M. Robinson dan Jhon B. Cobb, *The New Hermeneutics*. New York; Harper and Row, 1964..
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Shestack, Jerome J. *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Theodor Meron, edit., *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Sidiq, Mahfuds. *Hak Asasi Manusia Menurut Islam*. Jakarta: Al-Izzah, 2002.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Mizan Pustaka, 2006.
- Smith, Rhona K. M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008.
- Sobary, Mohamad. *NU dan Keindonesiaan*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Steiner, Henry J. dan Philip Alsto. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Sulhan, Moh., Asep Kurniawan, and Dedi Djubaedi. *Kontestasi Tafsir Agama: Akar Kekerasan Minoritas Dan Problem Pluralisme*. Kuningan: Crisis Press, 2007.
- Susantri, Reni. *When Human Rights Become So Political; State-Islam Relations and Its Impact on the Ahmadiyya Community in Indonesia*. The Netherlands: Institute of Soccial Studies, 2008.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi Dan Perluasan)*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.
- Syaukani, Luthfi. *Ensiklopedi Islam*, dalam "Dinamika Masa Kini". Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 2002.

- Syaukani, Luthfi. *Islam Warna-Warni*, Koran Tempo 13 Agustus 2002; Clifford Geertz, *The Religion of Java*. Glencoe: Free Press, 1960.
- Syaukani, Luthfi. *Tipologi Pemikiran Arab Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, vol I, No. 1, Juli-Desember 1998.
- Tamboukou, Maria. *Writing Genealogies: An Exploration of Foucault's Strategies for Doing Research*. ttp: t.p., t.t.
- Tarrow, Sidney. "Mad Cows and Social Activists: Contentious Politics in The Trilateral Democracies" dalam *Disaffected Democracies*, (ed.) Robert D. Putnam, Susan J. Pharr. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
- The United Nations. *Human Rights Questions and Answers*. New York; the United Nations Department of Public Information, 1988.
- Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah A. Ubaidillah, M. Arskal Salim, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Kencana, 2015.
- USAID-UNDP. *Hidup Sebagai LGBT Di Asia-Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT Di Asia*, 2013.
- Verkuyten, Maykel. *The Social Psychology of Ethnic Identity*. England: Psychology Press, 2004.
- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahid, Marzuki (ed.). *Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon*. Cirebon: Fahmina, 2017.
- Wahyudi, Yudian (ed). *Gerakan Wahabi di Indonesia: Dialog dan Kritik*. Yogyakarta: Bina Harfa, 2009.
- Wielandt, Rotraud. "Exegesis of the Qur'an: Early Modern and Contemporary," dalam *Encyclopedia of the Qur'an*. Leiden: Brill, 2002.

Yahya, K.H. Syarief Ustmsan. *Islam, Pesantren Dan Pesan Kemanusiaan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2008.

Zayd, Nasr Hamd Abu. *Maḥmūd al-Nās, Dirāsah fī Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kutub, 1993.

———. *Isykaliyat al-Ta'wil wa Aliyat al-Qira'ah*, Kairo: al-Markaz al-Tsaqafi, t.t.

Jurnal

Assyaukanie, Luthfi. “Fatwa and Violence in Indonesia”, dalam *Journal of Religion and Society*, vol.11, tahun 2009.

Baso, Ahmad. “Neo-Modernisme Islam Versus Post-Tradisionalisme Islam,” dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 10 Tahun 2001.

Budiman, Manneke. “Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities”, Volume 1, 2008..

Hamidah, Tutik. “Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh Jumhur ‘Ulama (Studi Metode Istinbath Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender”, dipresentasikan di 12th AICIS (*Annual International Conference on Islamic Studies*). Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Hasan, Noorhaidi. “Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities”, Volume 1, 2008.

Ma'rūf, A. Faridl. “Perihal Ideologi, Pengertian, Fungsi dan Kritiknya” dalam Jurnal *Filsafat Potensia*, Edisi Khusus Januari 2003.

Marhumah. “A Critical Reading on Hadīth: Islamic Feminist Approach in Reading Misogynistic Hadīth”, dalam *Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 21, Issue 8, Ver. 8 (August, 2016).

Mukharrom, M. Tamyiz. “Teologi Advokasi.” *Al-Mawarid* XII (2004): 110–120.

P. Oliver dan G. Marwell, “Mobilizing Technologies for Collective Action”, diterbitkan dalam *The Conference Volume Frontiers of Social Movement Theory*, 1992 (PDF).

- Rahman, Yusuf. "Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad, The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Quran Based Activism", dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55, no.2 (2017), 293-326.
- Rumadi, dkk. "Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU" dalam *Jurnal Istiqra'*, Vol. 2, No.1, 2003, 221-222.
- Schröter, Susanne. "Women's Movements and Counter Movements: The Quest for Gender Equality in Southeast Asia and the Middle East", Newcastle: Cambridges Scholars Publishing, 2014.
- Sobirin, Mohamad, "The Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama's Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for World Humanity?." Artikel *selected presenters* dipresentasikan pada 16th AICIS (*Annual International Conference on Islamic Studies*) di UIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Muslim dan Feminis Liberal", dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014.
- Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an menurut Husein Muhammad", dalam *Jurnal Al-'Araf'*, Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017.
- Vyver, Johan D. Van Der. "Religious Fundamentalism and Human Rights", dalam *Journal of International Affairs*, Summer 1996, V50, N1, P21. Colombia: University School of Public Affairs, 2006.
- Wichelen, Sonja van. "Journal of International Women's Studies", Volume 11, November-2009, Issue 1 "Gender and Islam in Asia", Artikel 12, Bridgewater State University, hlm. 173-188.
- Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia," dalam *Jurnal KHAZANAH*, Vol. 6 No.1 Juni 2013.

Artikel Cetak

“Fahmina Terima Kunjungan Durenbag Center.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, March 2015.

“Fokus: Kondisi Keberagaman Cirebon, Peran Negara Dan Masyarakat Mencegah Kekerasan Atas Nama Agama.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober-Desember 2015.

“Fokus: Menggerakkan Semarak Keberagaman Remaja.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober-Desember 2014.

“Forum Dan Komunitas: Jaringan Kerja Perdamaian Dan Keadilan Cirebon.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, September 2015.

“Forum Dan Komunitas: Menyambut Rutinitas Bahtsul Masail Perempuan Pesantren.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober-Desember 2014.

“Forum Dan Komunitas: Panggung Perempuan, Menuju Perempuan Berdaulat.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, March 2015.

“Forum Dan Komunitas: Setaman Dan Seruan Cinta Damai.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober-Desember 2015.

“Info Jaringan: Aktivis FKPM Menjadikan Masyarakat Sebagai Subjek.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober 2009.

“Info Jaringan: Asyik Belajar Kesehatan Reproduksi.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Mei 2009.

“Info Jaringan: Baitul Hikmah Semangat Terus Sosialisasikan Kesehatan Reproduksi.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, July 2009.

“Info Jaringan: Berkumpunya Merah Jingga.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, March 2012.

“Info Jaringan: Inisiasi Blog Jaringan Radio Komunitas.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Edisi Tahun 2009.

“Info Jaringan: Ketika Santri Menyoal Kespro.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Agustus 2010.

- “Info Jaringan: Live In, Upaya Mengenal Ahmadiyah Lebih Dekat.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, September 2014.
- “Info Jaringan: Menyelesaikan Persoalan Dengan Pola Kebersamaan.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, July 2009.
- “Info Jaringan: Merangkul Polisi Dalam Memperkuat Perspektif Pluralisme Agama.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, September 2012.
- “Info Jaringan: Penguatan Kapasitas Untuk Pemuda Lintas Iman.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, 2013.
- “Info Jaringan: Perlindungan Hak Kespro Dalam Al-Qur’an Dan UU Internasional.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober 2009.
- “Info Kegiatan: Pelatihan Media Rakyat Bagi Penggerak Komunitas, Meretas Perubahan Menuju Keadilan.” *Blakasuta; Ruang Merayakan Keterbukaan*, Edisi Tahun 2004.
- “Info Toleransi: Pengajian Kamisan Fahmina (Mengaji Perempuan Dari Sudut Egaliter).” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober-Desember 2015.
- “Info Toleransi: Pentingnya Kerjasama Untuk Menyuarakan Perdamaian.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, June 2015.
- “Islam: Recognized Homosexuality” (Islam Mengakui Homoseksualitas) dalam *The Jakarta Post*.
- “Laporan Khusus: Rohis Dan Pesan Keberagaman.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, June 2015.
- “Menabik Ikhtiar Setaman Dalam Menebarkan Pesan Perdamaian.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, March 2015.
- “Obrolan Polmas: Apa Sih Pelanggaran HAM Itu?.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, September 2012.
- “Obrolan Polmas: Bagaimana Tokoh Masyarakat Mengawal Toleransi Beragama.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, 2013.

Al-Mawdudi, Abul A'la. "Human Rights, The West and Islam", dalam Tahir Mahmood (Ed), *Human Rights in Islamic Law*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.

Hidayat, Syarif, and Rosidin. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Ahmadiyah." dalam *Membangun Kebersamaan dalam Keragaman; Potret Dari Cirebon*. Cirebon: Fahmina Institute, 2014.

HTI, "Homoseksual Mengancam Negeri" dalam Al-Islam 705, 9 Rajab 1435 H - 9 Mei 2014 M.

K.H. M.A. Sahal Mahfudz dalam pengantar buku Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Liddle, R. William. "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark. R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Penerjemah: Ihsan Ali Fauzi, Cet. 1. Bandung: Mizan, 1999.

Marsono, and Nurul Huda. "Para Nyai Dan Para Kiai Moderat; Pengalaman Dan Pengamalan Hidup Dalam Keragaman Di Cirebon." dalam *Membangun Kebersamaan Dalam Keragaman; Potret Dari Cirebon*. Cirebon: Fahmina Institute, 2014.

Marzuki, and Agus Idris. "Polemik Tuduhan Sesat Majelis Ta'lim Hidup Dibalik Hidup (DHD) Cirebon." dalam *Membangun Kebersamaan Dalam Keragaman; Potret Dari Cirebon*. Cirebon: Fahmina Institute, 2014.

Mas'udi, Masdar F.. "Paradigma Dan Metodologi Islam Emansipatoris." dalam *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*. 1st ed. Jakarta: P3M, 2004.

Muhammad, Husein. *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Islam*, dalam "Tanasul", edisi 20 Januari-Maret 2015 (Cirebon: Fahmina Institute).

———. *Perempuan Menari*, KOMPAS. Dimuat di www.fahmina.or.id.

———. *Pesantren sebagai Sumber Pembelajaran Pluralisme dan Multikulturalisme*, Epilog dalam Marzuki Rais, Nurul Huda, dkk,

- “Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman”. Cirebon: Fahmina, 2014.
- . “Epilog; Pesantren Sebagai Sumber Pembelajaran Pluralisme Dan Multikulturalisme.” dalam *Membangun Kebersamaan Dan Keragaman: Potret Dari Cirebon*, 277–292. Cirebon: Fahmina Institute, 2014.
- . “Fatwa: Bekerja Adalah Hak Setiap Warga.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Mei 2009.
- . “Fatwa: Haram Mempekerjakan Tanpa Penjelasan Hak-Hak Terhadap Pekerja.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, July 2009.
- . “Fatwa: Seharusnya Suami/Keluarga Tidak Melarang Perempuan Bekerja.” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, Oktober 2009.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Fahmina Institute, 2004.
- . “Islam dan HAM,” April 28, 2012.
- . “Khazanah: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Perspektif Islam).” *Tanasul: Risalah Kesehatan untuk Kemaslahatan*, March 2015.
- . “Menegakkan Kebenaran Konstitusional.” *Sindo*, April 1, 2011.
- . “Oase: Melindungi ‘Yang Lain’, Melindungi Tempat Ibadah ‘Yang Lain.’” *Blakasuta; Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas*, March 2015.
- . “HAM dan Gender Dalam Perspektif Islam.” *PUSKUMHAM*, April 10, 2008.
- Wielandt, Roudhot. “Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary.” dalam *Encyclopedia of the Qur’an*. Leiden: Brill, 2002.

Artikel Online

- Muhammad, Husein. “Berdialoglah.” *HuseinMuhammad.Net*, 12 Juli 2014. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/berdialoglah/>.

- . “Islam Agama Kasih Sayang.” *HuseinMuhammad.Net*, 8 Januari 2016. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/islam-agama-kasih-sayang/>.
- . “Islam dan Kemerdekaan (Kebebasan).” *HuseinMuhammad.Net*, 16 Juli 2014. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/islam-dan-kemerdekaan-kebebasan/>.
- . “Islam: Kepasrahan, Keselamatan dan Kedamaian.” *HuseinMuhammad.Net*, 3 Juli 2014. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/islam-kepasrahan-keselamatan-dan-kedamaian/>.
- . “Islam: Yang Tetap dan Yang Berubah.” *HuseinMuhammad.Net*, 14 Maret 2016. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/>.
- . “Kebhinekaan adalah Indonesia.” *HuseinMuhammad.Net*, 6 November 2016. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/kebhinekaan-adalah-indonesia/>.
- . “Kekerasan atas Nama Agama: Pengetahuan yang Terbatas.” *HuseinMuhammad.Net*, 3 Juli 2013. Diakses 24 Januari 2018.. <https://huseinmuhammad.net/kekerasan-atas-nama-agama-pengetahuan-yang-terbatas/>.
- . “Kontekstualisasi Kitab Kuning.” *HuseinMuhammad.Net*, 10 Agustus 2014. Diakses 24 Januari 2018.. <https://huseinmuhammad.net/kontekstualisasi-kitab-kuning/>.
- . “Manusia Itu Terhormat.” *HuseinMuhammad.Net*, 4 Juli 2017. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/manusia-itu-terhormat/>.
- . “Merawat Keyakinan Monoteistik (Tauhid).” *HuseinMuhammad.Net*, 22 Juni 2014. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/merawat-keyakinan-monoteistik-tauhid/>.
- . “Pesantren dan Toleransi.” *HuseinMuhammad.Net*, 16 Januari 2016. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/pesantren-dan-toleransi/>.

- . “Refleksi 2017.” *HuseinMuhammad.Net*, 1 Januari 2018. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/refleksi-2017/>.
- . “Rekonstruksi Pemikiran Islam Membangun Kemanusiaan.” *HuseinMuhammad.Net*, 3 Juli 2014. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/rekonstruksi-pemikiran-islam-membangun-kemanusiaan/>.
- . “Syari’at dan Kemaslahatan.” *HuseinMuhammad.Net*, 14 Maret 2016. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/syariat-dan-kemaslahatan/>.
- . “Toleransi Islam.” *HuseinMuhammad.Net*, 12 Juli 2014. Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/toleransi-islam/>.
- . “Kebebasan Adalah Keindahan.” Diakses 24 Januari 2018. <https://huseinmuhammad.net/kebebasan-adalah-keindahan/>.
- . “7 Makna Nalar Moderat | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2017/10/20/7-makna-nalar-moderat/>.
- . “Agama Sumber Kekuatan Pencerahan, Pergerakan, dan Pemberdayaan Masyarakat | Fahmina.Or.Id,” 2013. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2013/11/22/agama-sumber-kekuatan-pencerahan-pergerakan-dan-pemberdayaan-masyarakat/>.
- . “Jihad dan Respon Islam Terhadap Radikalisme (Bagian 1) | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2015/09/07/jihad-dan-respon-islam-terhadap-radikalisme-bagian-1/>.
- . “Kebangkrutan Beragama | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2016/06/15/kebangkrutan-beragama/>.
- . “Keimanan: Keyakinan Personal | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2009/07/29/keimanan-keyakinan-personal/>.
- . “Kemerdekaan | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2013/08/16/kemerdekaan/>.

- . “Keterbatasan Pengetahuan | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2016/04/13/keterbatasan-pengetahuan/>.
- . “Menghargai ‘Yang Lain’ | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2015/05/18/menghargai-yang-lain/>.
- . “Menyikapi Perbedaan | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2017/08/08/menyikapi-perbedaan/>.
- Fahmina. “Info Program | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2009/06/16/info-program/>.
- . “Islam dan Demokrasi | Fahmina.Or.Id,” n.d. Accessed Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2014/05/12/islam-dan-demokrasi/>.
- . “Islam dan Gender | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2014/11/23/islam-dan-gender/>.
- . “Penguatan Otonomi Komunitas | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2014/05/12/penguatan-otonomi-komunitas/>.
- . “Profil Yayasan Fahmina | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2015/05/20/profil-yayasan-fahmina/>.
- . “PUSDAIM (Pusat Data, Informasi dan Media) | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2014/05/12/pusdaim-pusat-data-informasi-dan-media/>.
- . “Sejarah Fahmina | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2015/05/06/sejarah-fahmina/>.
- . “Mitra Kerja | Fahmina.Or.Id,” n.d. Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/mitra-kerja/>.
- “Menghasut, Kajian Oleh Husein Muhammad,” Diakses 24 Januari 2018. <http://www.gemasalaf.com/2017/11/menghasut-kajian-oleh-kh-husein-muhammad.html>.

———. “ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) | Fahmina.Or.Id.” Diakses 24 Januari 2018. <https://fahmina.or.id/2014/05/12/isif-institut-studi-islam-fahmina/>.

Husaini, Adian. “Prof UIN Jakarta Halalkan Homoseksual”, dalam situs www.hadayatullah.com.

Komnas Perempuan, *Commissioners For 2010-2014*, <http://www.komnasperempuan.or.id/en/about/komisionerperiode-2010-2014/>, diakses 8 April 2016.

Tanskrip Wawancara Radio Elshinta tanggal 27 Maret 2010 dengan Soe Tjen; Siti Musdah Mulia; “Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam”, dalam <http://icrp-online.cb.net>.

Dokumen

Majlis Ulama’ Indonesia. “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekularisme Agama,” 2005.

United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. *Indonesia 2013 Human Rights Report-Country Reports on Human Rights Practices for 2013*, 2013.

Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia, No.57 tahun 2014 tentang “Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan”.

Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan. “Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) - Jalan Lain Memahami Hak Minoritas,” ttp.:t.p., t.t.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prop. Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prop. Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/ Munas VII/ MUI/ II/ 2005, Tentang “Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama”, Jakarta: 29 Juli 2005.

Tempo.co 23 Desember 2002: “Fatwa Mati Ulil”.

Wawancara

1. Husein Muhammad, 5 kali sepanjang 2016-2019, berlangsung di Cirebon (2 kali), Semarang (2 kali), dan Jakarta (1 kali).
2. Rosidin (Direktur Fahmina) dan beberapa pengurus Fahmina, 2 kali, di Cirebon, tahun 2016.
3. Marzuki Wahid (ISIF), di Semarang, 2019.
4. Siti Musdah Mulia (ICRP), lewat telfon, selama 2-3 jam, 2017.
5. Ulil Absor Abdalla (JIL), di Jakarta, 2016.
6. Lies Marcoes Natsir (Rumah Kitab), 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Mohamad Sobirin**
Kota Lahir : Rembang, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : 7 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/III-b
Alamat (KTP) : Karangduren RT 002/RW 003 Sokaraja
 Banyumas
Alamat Kantor 1 : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora,
 UIN Walisongo Semarang
Alamat Kantor 2 : Ponpes Kader Bangsa Darul Ulum Wal
 Hikam (PP.DAWAM), Yogyakarta
Mobile Phone : +62 85290166620
E-mail : msobirin.sahal@gmail.com
 mohamadsobirin@walisongo.ac.id
Nama Ayah : H. Ahmad Sahal
Nama Ibu : Hj. Juwariyah
Nama Istri : Karimatul Khasanah
Nama Anak : Alysia Zharufa Almagelsey (4 tahun)
 Thibitalia Nahidlah Fauztina (1 tahun)

Karya Akademik

Strata	Judul
S1 (Skripsi)	<i>Slavery Verses in The Qur'an and Modern Human Trafficking Issues (Hermeneutical Analysis Based On Hassan Hanafi 's Exegesis Theory)</i>
S2 (Tesis)	Bid'ah-Bid'ah Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Abdallah Shiddiq Al-Ghumary (Kritik Tafsir Regresif dalam Kitab <i>Bida' At-Tafsir</i>)

Riset dan Publikasi

Tahun	Judul
Web of Science Researcher ID (Thomson Reuters): Q-9595-2016	
2019	<i>The Translation of the Qur'an into the Oldest Javanese Language, Banyumasan: 'Ulama', Javanese Etiquette, and Sacred Scripture.</i> Penelitian dalam bentuk <i>book chapter</i> ini akan diterbitkan oleh Routledge Studies in The Qur'an, 2019, yang dieditori oleh Prof. Johanna Pink, dalam buku yang

	berjudul <i>The Qur'an in Indonesia: Vercularising Scripture in a Multilingual Nation-State</i> , pada <i>Part Two: The Indonesian Government, Its Translation Project and The Agency of Ulama'</i> .
2019	<i>Innovative Way of Indonesian Muslim Millennial to Memorize the Qur'an: Qur'an-Memo Community and The Making of Virtual Social Network</i> , (proses review) diterbitkan oleh IEEE, indexed by Scopus.
2019	<i>Negotiating Tradition and Innovation upon the Cross-Generational Art of Singiran (Improvisation, Cultural Identity and Millennial Community)</i> , diterbitkan oleh "Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism", Vol 8, No. 1 (2109).
2016-2018	<i>Are Private Islamic Schools in Indonesia Educationg for or Against Religious Extremism?</i> , penelitian kolaboratif <i>multiyears</i> (sebagai anggota) antara UIN Walisongo dan MONASH University Australia, dibiayai oleh The Australia-Indonesia Centre (AIC).
2018	Tarjamah Tafsiriyah Al-Qur'an Majelis Mujahidin Indonesia (MMI): Analisis Sosio-Pragmatis atas Ayat <i>Thagut</i> , <i>Tahkim</i> , <i>Ulil Amri</i> dan <i>Auliya'</i> , dan Relevansinya dengan Wacana Relasi Agama dan Negara, penelitian individu dibiayai oleh BOPTN UIN Walisongo, diterbitkan oleh Walisongo Press.
2018	<i>The Virtual Ulama': Civic Education and Religiosity in Indonesia Networked Society</i> , penelitian kolaboratif internasional (sebagai anggota), dibiayai oleh Kementerian Agama RI.
2018	<i>Reviving Prophet's Sport Tradition in Modern Day Indonesia; Does Follow the Prophet Means Radical?"</i> diterbitkan oleh ATLANTIS Press in Advanced in Social Sciences, Education, and Humanities Research (ASSEHR) volume 137, 2018, indexed by Thomson Reuters.
2018	<i>Kiai Muhaimin's Thought and His Outreach Activity of Dakwah for Promoting Moderation and Preventing Conflict in Indonesian Plural Society</i> , diterbitkan oleh Jurnal "Religia", Vol. 21 No.2 (2018)

2017	Implementasi <i>Unity Of Sciences</i> dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS): Survei Kebijakan Mutu Akademik di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo), penelitian kompetitif kolektif dosen, dibiayai oleh BOPTN UIN Walisongo, diterbitkan oleh Walisongo Press.
2017	<i>Portraying Peaceful Coexistence and Mutual Tolerance Between Santri and Chinese Community in Lasem</i> ” diterbitkan oleh Jurnal “Walisongo”, volume 25 No.2 (2017).
2016	<i>Digital Qur'an and Its Translation; Understanding the "New" Mushaf & Indonesian Muslim's Religious Experience in New Media World</i> . Penelitian ini dimuat dalam prosiding Internasional Conference on The Holy Qur'an, 2016.
2016	<i>The Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama's Worldview; How Does Kyai Husein Muhammad Work for World Humanity?</i> . Penelitian ini dipresentasikan di The 16 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), 2016.
2016	<i>Hate Speech and Religious Intolerance: The Living Word of Kâfir in Current Modern Plural Societies</i> . Penelitian ini dikerjakan untuk The 1 st Arraniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS), 2016.
2016	<i>How Does Husein Muhammad Work for Minorities Rights? The Negotiated Gaps between Islam and Human Rights on Indonesian Ulama's Worldview</i> . Penelitian ini dikerjakan untuk Internatioanal Conference on Islam and Human Right (ICIHR), Yogyakarta.
2016	<i>How Do Qur'an and Pluralism Constitute Indonesian Muslim's Socio-Religious Identity In Post-New Order Indonesia? A Contextual Qur'anic Approach toward Inter and Intra-Faith Relationship Discourse</i> . Penelitian ini dipresentasikan di International Symposium on Religious Life (ISRL), Jakarta.

2015	<i>Kyai Muhaimin: Pluralism Vis-A-Vis Preaching Religion in Multicultural Society (An Outreach Activity of Dakwah for Promoting Moderation and Preventing Conflict in Indonesian Socio-Religious Life)</i> . Penelitian dipresentasikan di The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), 2015.
2015	<i>Lasem: Embodied Peacefull Coexistence, Tolerance, and Respect for Other Faith in Indonesia (Attitudes Toward Plural Societies)</i> . Penelitian ini dipresentasikan di Joint International Conference “Islam, Plural Societies, and Legal Pluralism”, Jerman, 2015.
2014	<i>Pesantren Baru: Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam Tradisional</i> , CV.Trensindo, Yogyakarta, 2014.
2014	<i>Hermenutika Hadits Mahmud Abu Rayyah dalam Kitab Adwa’ Ala Al-Sunnah Al-Nabawiyyah (Kajian ‘Adalah As-Sahabah)</i> , Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
2013	<i>Kamus Fiqh dan Ushul Fiqh “Al-Maqashid”</i> , Pustaka Pesantren, Yayasan At-Turats Indonesia, 2012.
2012	<i>Kitab Dalail al-Dawamiyyah</i> , Maktabah Ma’had Darul Ulum wal Hikam, Yogyakarta, 2012.
2011	<i>Deradikalisasi Tafsir Ayat-Ayat Jihad; Sebuah Upaya Kritik Historis, Eideetik dan Praksis</i> . Penelitian dibiayai oleh Kementerian Agama RI, 2011, untuk PTKIS, sebagai anggota peneliti di STIQ AN-NUR Bantul Yogyakarta.
2008	<i>Jago Berbahasa Arab, Panduan Praktis bagi Jamaah Haji, Umroh dan TKI (‘Amiyah Saudi Arabia)</i> , PT. Elex Telekomindo-Gramedia, Jakarta, 2008.
2008	<i>La Taskut (Fusha, Amiyah dan Budaya dalam Bahasa Arab)</i> , Pustaka Rizki Putra – PT. Toha Putra Group, Semarang, 2008. <i>Best Seller</i> . (Pengantar oleh KH. Ahmad Warson Munawwir Krapyak)

Editor	
2017	KH. Ahmad Sugeng Utomo, <i>Santripreneur Indonesia</i> , Yayasan Santripreneur Indonesia dan PT. Rumah Entrepreneur Indonesia, Yogyakarta, 2017.
2011	Aboe Bakar Atjeh, bagian “ <i>Karangan Tersiar</i> ” <i>Wahid Hasyim</i> , diterbitkan oleh MIZAN, 2011.
2011	Achmad Zaini, “ <i>KH. Abdul Wahid Hasyim; Pembaru Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan</i> ”, Yayasan K.H. A. Wahid Hasyim dan Forum Indonesia Satu (FIS), 2003. Diterbitkan ulang pada Juni, 2011.
2010	“ <i>Iqamah Al-Hujjah Ala Anna Al-Iksar fi At-Ta’abbud Laitsa Bi Bid’ah</i> ”, Abu Al-Hasanat Muhammad Abd Al-Hayy Al-Laknawi, diterjemahkan dengan judul “ <i>Kupas Tuntas Bid’ah</i> ”, diterbitkan oleh Pustaka Al-Muhsin Yogyakarta, 2010.
2010	“ <i>Ifadah At-Thullab</i> ”, Abu Al-Faidl Muhammad bin Ahmad bin Abd Al-Bari Al-Ahdal, diterjemahkan dengan judul “ <i>Kado Fatihah Untuk Muhammad dan Pecintanya</i> ”, diterbitkan oleh Pustaka Al-Muhsin Yogyakarta, 2010.
Editor dan Penerjemah	
2008	“ <i>As-Syarhu wa at-Ta’lil li Alfadzi al-Jarh wa at-Ta’dil</i> ”, Yusuf Muhammad Shiddiq, <i>Kamus Integritas Perawi Hadits (Istilah Jarh dan Ta’dil)</i> , diterbitkan untuk kegiatan perkuliahan <i>Ilmu Jarh wa Ta’dil</i> yang diampu oleh Dr. A. Hasan Asyari ‘Ulama’i, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo.
	“ <i>Law and Power in the Islamic World</i> ”, Sami Zubaiba, “ <i>Perjumpaan Shari’ah dan Kekuasaan (Studi Kasus di Mesir dan Iran)</i> ”, diterjemahkan sebagai tugas kuliah kolektif pada mata kuliah <i>Ushul Fiqh</i> yang diampu oleh Dr. Muhyar Fanani, dan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo.
Artikel Media	
2018	Membaca Al-Qur’an, Kitab Tanda Abad Milenial, Jawa Pos, 29 Mei 2018.
2017	Agama dan Kesantunan Berekspresi, Jawa Pos, Kamis 8 Juni 2017.

2017	Catatan Pergumulan Kebangsaan: Dari Akademisi Hingga Kiai, Rahim Bangsa, Februari 2017.
2016	Generasi Baru dan Pendidikan Kebangsaan, Rahim Bangsa, Desember 2016.
2010	<i>Kiai Maemoen Zubair, Mentradisikan Salaf dan Melestarikan Arab Pegon</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 1, no.1, Januari 2010.
2010	<i>Pesan Mukhtar dan Khittah 1926: NU, Pesantren dan Politik</i> , vol. 1, no.2, Juni 2010.
2010	<i>Koperasi Sidogiri, Santri Sadar Wirausaha</i> , vol. 1, no.3, Oktober 2010.
2011	<i>Islam Nusantara: Dinamika Pemikiran dalam Menyikapi Tradisi dan Modernitas</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 2, no.1, Januari 2011.
2011	<i>Ragam Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Indonesia</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 2, no.2, Juni 2011.
2011	<i>Hadrotus Syekh Hasyim Asy’ari, Pejuang Tanah Air dan Pembaharu Pesantren</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 2, no.3, Oktober 2011.
2012	<i>Relasi Integratif Pesantren dan Islam Nusantara</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 3, no.1, Januari 2012.
2012	<i>Arab-Pegon, Pesantren, dan Warisan Islam Nusantara</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 2, no.2, Juni 2012.
2012	<i>KH. Musthofa Bisri: Sosok Kiai Multitalenta yang Piawai</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 2, no.3, Oktober 2012.
2013	<i>Arab Pegon dan Tafsir Lokal Jawa, Al-Ibriz Lima’rifati at-tafsir Al-Qur’anil ‘Aziz</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 4, no.1, Januari 2013.
2013	<i>Pesantren Kauman Lasem, Toleransi di Tengah Kampung Pecinan</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 4, no.2, Juni 2013.
2013	<i>Akar Pemikiran Moderat dan Progresif dalam NU: KH. Wahab Hasbullah</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 4, no.3, Oktober 2013.
2014	<i>Revitalisasi Pesantren Salaf</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 5, no.1, Januari 2014.

2014	<i>Kajian Manuskrip: Etika Santri menurut Al-Jarnuji</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 5, no.2, Juni 2014.
2014	<i>KH. M.A. Sahal Mahfudz, Pembaharu Fiqih di NU dan Pesantren</i> , Majalah Arab Pegon “At-Turats”, vol. 5, no.3, Oktober 2014

Pemateri Konferensi Internasional

Tahun	Konferensi/Seminar
2018	International Research Expose, 19-25 November 2018, di the Australia-Indonesia Center (AIC) Melbourne, dan MONASH University, Melbourne, Australia.
2018	The 2nd International Conference on Qur'an and Ḥadīth Studies (2th ICONQUHAS) “ <i>Information Technology and Media: Chalanges and Opportunities</i> ”, diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT), Bandung, 1-4 Oktober 2018.
2018	International Conference and Workshop on “ <i>The Translation of The Qur'an in Indonesia</i> ”, diselenggarakan oleh Albert-Ludwigs Unversitat Freiburg Germany dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 30-31 Juli 2018.
2018	2 nd International Symposium on Religious Life/ISRL (2018), diselenggarakan oleh Balitbang Kementerian Agama RI bekerjasama dengan ICRS (Indonesian Consortium for Religious Life) Universitas Gajah Mada (UGM), di Hotel Novotel Yogyakarta, 6-9 November 2018.
2017	17 th AICIS (Annnual Interntional Conference on Islamic Studies), sebagai Ketua Panel (Chair) <i>Traditional Ulama' in Networked Society of Indonesia</i> , diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, berlokasi di BSD City, Jakarta.
2017	1 st ICONQUHAS (International Conference on Qur'an and Ḥadīth Studies), berlokasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
2016	International Symposium on Religious Life (ISRL), menyampaikan materi <i>How do Qur'an and</i>

	<i>Pluralism Constitute Indonesian Muslim's Socio-Religious Identity In Post-New Order Indonesia</i> , Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, 5-7 Oktober 2016.
2016	International Conference of the Holy Qur'an (ICHQ), diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI bekerjasama dengan lembaga Alquran di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Lokasi di Hotel Aryaduta Jakarta, 30 Agustus – 1 September 2016,
2016	The 16 th AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies), diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, berlokasi di IAIN Raden Inten Lampung, 1-4 November 2016
2016	The 1 st Arraniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS), diselenggarakan oleh UIN Arraniry Aceh, 26-27 Oktober, 2016.
2016	International Conference on Islam and Human Right (ICIHR), diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12-13 Oktober, 2016.
2015	The 15 th AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies), diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, di Peninsula Hotel, 3-6 September 2015, Manado.
2015	Joint International Conference "Islam, Plural Societies, and Legal Pluralism", diselenggarakan di Georg August Universitat, Gottingen, 28 -29 Juli 2015, Jerman.

Pendidikan

a. Pendidikan Tinggi

Institusi	Jurusan	Gelar	Predikat	Tahun Masuk	Tahun Lulus
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Agama dan Filsafat (Studi Quran Hadits-SQH)	M.Hum	<i>Cumlaude</i>	2011	28 Juni 2013
IAIN Walisongo, Semarang	Tafsir Hadits-FUPK (Program Khusus/Kelas	S.Th.I	<i>Cumlaude</i>	2006	29 Desember 2009

	Internasional)				
--	----------------	--	--	--	--

b. Sekolah Formal

Tingkat	Sekolah	Tahun
SD	SD N II Pamotan Rembang	1993 – 1999
SMP/MTs	MTs N I Pamotan Rembang	1999 – 2002
SMA/MA	MA “Raudlatul Ulum” –YPRU– Guyangan Trangkil Pati	2002 – 2005

c. Pendidikan Non Formal

Institusi	Tahun
<i>Jam’iyatul Qurra’ wal Huffadz</i> (JQH) NU Rembang - 2002
<i>Madrasah Diniyah Ibtidaiyyah</i> (MI) “Manba’ul Huda”, Ma’arif NU, Pamotan Rembang	1995 – 2001
<i>Madrasah Diniyah Tsanawiyyah</i> (MTs) “Manba’ul Huda”, Ma’arif NU, Pamotan Rembang	2001 – 2002
Pondok Pesantren “Salafiyah” Yayasan Al-Aziziyah, Jeruk Pancur Rambang – 2002
Pondok Pesantren “Raudlatul Ulum”, Guyangan Trangkil Pati, Central Java	2002 – 2005
Pondok Pesantren “Darul Lughah wad Da’wah”, Bangil Pasuruhan, (persiapan kuliah di Universitas “Al-Ahgaf”, Yaman)	2005
Pondok Pesantren Ulil Albab Ngaliyan Semarang	2006–2008
Pondok Pesantren Al-Itqon Pedurungan Semarang (<i>Santri Kalong</i>) dan Lembaga Bahtsul Masa’il PWNu Jawa Tengah (<i>Peserta Aktif Bahtsul Masa’il</i>)	2008-2009
Pondok Pesantren di Krapyak Yogyakarta (Al-Munawwir dan Al-Muhsin)	2010-2011

d. Pendidikan Workshop

Institusi	Tahun
“Graduate Workshop on Research Methodology” di George August Universitat, Goettingen, Jerman.	2015

Wokshop Penelitian Moderasi Islam oleh Kementerian Agama RI	2018
Workshop Active Learning (ALFI) oleh LPM UIN Walisongo	2016
Workshop Penulisan Jurnal Internasional Bereputasi oleh LPPM UIN Walisongo	2017

Narasumber/Juri/Penghargaan

Nama	Prestasi/Peran	Pemberi Penghargaan/ Penyelenggara	Tahun
Narasumber, pemberdaya, dan peneliti di 122 daerah 3T (Aceh-Papua) selama 2 tahun	Narasumber, pemberdaya, dan peneliti	BAKTI-KOMINFO RI	2018-2019
Seminar Nasional “Al-Quran antara Teks dan Konteks di Era Digital” Menyampaikan materi tentang “Mushaf “Baru” dan Living Qur’an “Kalimat Tauhid” di Media Sosial dengan Pendekatan SNA (Arah Baru Studi Qur’an dan Teknologi Informasi di Era Post-Truth)”	Narasumber (Dipanelkan dengan KH. Husein Muhammad)	HMJ-Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) UIN Walisongo	2018
Surat Pencatatan Ciptaan (HAKI) Buku La Taskut	Penerima	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018
Beasiswa Program Penyelesaian Pendidikan Doktor LPDP	Penerima	LPDP, Kementerian Keuangan RI	2017
Call for Paper	Reviewer dan	FKMTHI	2016

LKTI bertema “Al Qur’an Hadits, Korupsi, dan Hukum”	Dewan Juri	(Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits se-Indonesia)	
Santripreneur Award 2016 dan 2017	Dewan Juri	Santripreneur Indonesia	2016 dan 2017
Stadium Generale PP. Darul Falah Besongo Semarang	Narasumber	PP. Darul Falah Besongo Semarang	2016
Seminar Nasional “Pemuda, Radikalisme, dan <i>Cyber Media</i> ”	Narasumber	JPMI bekerjasama dengan FKPT-BNPT RI, dan UNISSULA Semarang	2016
Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) UIN Walisongo	Dewan Juri	FUHUM-PK UIN Walisongo	2016
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Nasional “Pemuda Hebat”	Dewan Juri	Himpunan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta	2013
Seminar Nasional “Jurnalisme Santri” sebagai salah satu rangkaian acara haul KH.Suyuthi Abdul Qadir	Narasumber	PP. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati	2012
Musbaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) cabang Tahfidz dan Tafsir Al-Qur’an 15 Juz	Juara II	UIN Walisongo, Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah dan Pemprov. Jawa Tengah	2006

Pengalaman Pekerjaan

Institusi	Posisi	Tahun
UIN Walisongo Semarang	Dosen	2016 - sekarang
Santripreneur Indonesia	Dewan Penyelaras Ilmu	2015-sekarang
Pengurus Pusat HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri-PBNU)	Ketua Bidang Perguruan Tinggi	2014-2017 dan 2018-2023
Ma'had FUHUM-PK (Al-Jami'ah Putra) UIN Walisongo	<i>Musyrif</i>	2016-sekarang
Jurnal TEOLOGIA	Editor	2016 - sekarang
TEOSOFIA, <i>Indonesian Journal of Islamic Mysticism</i>	Deputy Editor	2016 - sekarang
Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang	Guru Ngaji Kitab Kuning	2016-sekarang
Pondok Pesantren Ulil Albab Semarang	Guru Ngaji Kitab Kuning	2016
STEBI Al-Muhsin Yogyakarta	Dosen	2014 –2016
Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Hikam (DAWAM) Yogyakarta	Ketua Yayasan Guru Ngaji Kitab Kuning	2012 – sekarang
CV. Trensindo	Direktur	2011-sekarang
PT. Sambung Nyowo	Direktur Utama	2014-2015
Majalah Arab-Pegon “AT-TURATS”	Pemimpin Redaksi Redaktur Pelaksana	2010 – sekarang
Pondok Pesantren “Al-Muhsin” Krapyak Yogyakarta	Guru Ngaji Kitab Kuning	2010 – 2011
STIQ An-Nur, Bantul Yogyakarta	Dosen	2010
Majalah “Mitra Koperasi” dan “Microbiz”, dibawah Dekopinwil Jateng dan DIY	Wartawan	2007-2009

Minat Keilmuan: Studi Qur'an-Hadits, Studi Pemikiran Progresif, Studi Agama Digital (Teknologi Informasi), Studi Organisasi dan Gerakan Islam di Indonesia, Studi Hak Asasi Manusia dan Gender, Studi Pesantren dan Ulama', Studi Pluralisme dan Radikalisme Agama.

Yogyakarta, 4 Maret 2019
Ttd,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohamad Sobirin', with a large, sweeping flourish at the beginning.

Mohamad Sobirin